

SKRIPSI

**POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DPD PARTAI
SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diusulkan oleh:

**ILHAMSYAH
105640194314**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DPD PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA (PSI) KABUPATEN WAJO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ILHAMSYAH

Nomor Stambuk: 105640 1943 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo "

Nama Mahasiswa : Ilhamsyah

Nomor Stambuk : 105640194314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Abdul Kadir Advs, SH,MM


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

Mengetahui:

Dekan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M.Si


Dr. Nuryanti Mustari., S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 037/FSP/A.3-VIII/VI/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Rabu Tanggal 26 Bulan Juni Tahun 2019

TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.sos., M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH., MM (Ketua) ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. M. Amin Umar, S.Ag., M..PD.I ()
4. A Luhur Prianto, S.IP., M.Si ()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilhamsyah
Nomor Stambuk : 10564 0194314
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah Hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 26 Juni 2019

Yang Menyatakan,

Ilhamsyah

ABSTRAK

Ilhamsyah. 2019. Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. (dibimbing oleh Abdul Kadir Adys dan Andi Luhur Prianto)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pola Rekrutmen dan Prosedur Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam menetapkan calon legislatifnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dibantu dekumentasi untuk mencari fakta aktual. Sementara informan pada penelitian ini adalah pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo, Calon Legislatif, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan dalam waktu yang berbeda dengan menggunakan trigulasi sumber, trigulasi metode, trigulasi waktu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses rekrutmen calon legislatifnya menggunakan pola rekrutmen terbuka dengan memberikan kebebasan kepada siapapun yang ingin bergabung dengan pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dan tidak menggunakan pola tertutup yang hanya akan menguntungkan segelintir elit saja. Kedua proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo melalui 3 tahap seperti penyediaan, kriteria dan kontrol. Pada tahap penyediaan pihak partai mengatur mulai dari mekanisme, waktu dan tempat hingga sarana perekrutan yang telah ditentukan pihak, pada tahap kriteria sangat memperhatikan faktor usia dan kapabilitas bakal calon dan tidak mempermasalahkan popularitas bakal calon dan menerima siapapun yang ingin bergabung tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin dan sebagainya dan pada tahap kontrol pihak partai mendampingi dan mengawasi proses rekrutmen sampai masa kampanye calon nantinya. Ketiga dalam pemilu 2019 kegagalan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dikarenakan masyarakat Kabupaten Wajo masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan gender dalam memilih calon pemimpin dan calon legislatif.

Kata Kunci : Pola Rekrutmen, Calon Legislatif, Partai Solidaritas Indonesia.

KATA PENGANTAR



Tiada kata indah yang patut di ucapkan seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Penulisan skripsi ini guna bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan dari program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun saya menyadari begitu banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang teristimewa dan terdalam penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Marzuki dan Ibunda Rusnawati, karena semua usaha penulis tidak berarti apa-apa tanpa adanya pengorbanan dan dorongan semangat yang sangat luar biasa dari beliau yang selalu suka rela melakukan segala hal, memberikan doa yang tulus, motivasi, nasehat serta bimbingan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih juga untuk saudara sedarah penulis yang selalu menyayangi dan memberi semangat untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.

Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Abdul Kadir Adys, SH, MM selaku Pembimbing I dan Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini sekaligus sebagai Penguji pada Ujian Skripsi Penulis.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si dan bapak Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus sebagai salah satu Penguji pada Ujian Skripsi Penulis.
3. Ibu Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus sebagai salah satu Penguji pada Ujian Skripsi Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA).
6. M Amir Umar, S Ag, M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus sebagai salah satu Penguji pada Ujian Skripsi Penulis.
7. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

8. Pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab Wajo, Calon Legislatif dan Tokoh Pemuda yang telah menerima dengan baik dan bersedia menjadi informan selama penelitian berlangsung.
9. Orang-orang yang terlampir namanya pada daftar pustaka yang telah menyumbangkan karyanya yang sangat membantu penulis dalam mencari referensi terkait judul skripsi penulis.
10. Teman dari awal masuk kampus sampai sekarang IP B yang sekaligus teman kelas dari semester 1 sampai semester 8.
11. Teman-teman angkatan 2014 “AFILIASI”.
12. Keluarga penulis yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 26 Juni 2019

Penulis

ILHAMSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Partai Politik	10
B. Rekrutmen Politik Calon Legislatif.....	13
C. Kerangka Pikir	19
D. Fokus Penelitian.....	19
E. Deskripsi Fokus Penelitian	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	21
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Informan Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	25

G. Keabsahan Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian.....	29
B. Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	
Kabupaten Wajo	37
BAB V PENUTUP	75
Kesimpulan	75
Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian	23
Tabel 2. Jumlah penduduk 14 kecamatan.....	31
Tabel 3. Daftar Nama Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.....	70
Tabel 4. Jumlah Perolehan Suara PSI Setiap Dapil.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Wajo	32
Gambar 2. Struktur Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Wajo	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa Orde Baru atau masa kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia, Partai politik dianggap sebagai hal yang menyebabkan ketidakstabilan politik, oleh karena itu pemerintah mencoba menyederhanakan partai politik, dan hasilnya memunculkan tiga partai politik diantaranya Golkar, PPP, dan PDI . Meskipun dari segi jumlah partai politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu, Indonesia digolongkan dalam jajaran negara yang menganut sistem multi partai, akan tetapi adapula beberapa pengamat politik beranggapan bahwa sistem yang dianut Indonesia pada saat itu adalah sistem partai tunggal, dan ada juga yang mengatakan sistem partai dominan.

Akan tetapi secara keseluruhan kekuatan politik di masa Orde baru ini dapat dikategorikan pula ke dalam golongan yang radikal, konservatif dan moderat, sedangkan di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru adalah era yang memberikan harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik karena pada orde baru sistem politik yang ada dinilai tidak sesuai dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, egaliter, memihak masyarakat sipil, membebaskan dan memberikan ruang gerak bagi warga negara (Anto, 2016).

Paska reformasi tahun 1998, Partai Politik memiliki kedaulatan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari segi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002

mengamankan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (*eksekutif*), perwakilan (*legislatif*), dan peradilan (*yudikatif*) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menggambarkan bahwa fungsi serta keberadaan partai politik menjadi sangatlah penting dalam relasi penempatan pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis (Saputra, 2012).

Merujuk dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa partai politik mempunyai posisi serta peranan yang sangatlah penting dalam sistem demokrasi, partai politik sebagai jembatan atau alat penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan yang berpendapat kalau partai politiklah yang menentukan demokrasi dalam artian semakin besar peranan dan fungsi partai politik maka semakin berkualitas demokrasi itu sendiri.

Menurut Gabriel A. Almond partai politik merupakan organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas dalam mencapai suatu tujuan, mempunyai ideology (*ideal objective*), mempunyai program politik platform, sebagai rencana pelaksana atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka pendek hingga dengan jangka panjang serta memiliki ciri berupa kemauan untuk berkuasa. Dengan demikian, setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria diatas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai partai politik (Rusandi, 2004).

Keterlibatan partai politik dalam ajang demokrasi Indonesia harus menjadi wadah yang benar-benar menerima atau membentuk kader yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan bangsa dan negara melalui rekrutmen yang terbaik. Rekrutmen politik itu sendiri menurut Surbakti dalam Rahmadania (2014) Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan beberapa peranan dalam sistem politik pada umumnya serta pemerintahan pada khususnya.

Adapun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut menjelaskan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata serta disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan dan penyempurnaan sebuah partai politik diarahkan pada dua hal yang utama, yaitu pertama, membentuk sikap serta perilaku partai politik yang terpolakan atau sistemik dalam membentuk budaya politik yang mendukung prinsip dasar sistem demokrasi, hal ini digambarkan dengan sikap serta perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi juga rekrutmen keanggotaan yang memadai serta membangun sistem pengkaderan dan juga kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi terhadap negara maupun terhadap rakyat dengan pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif dalam memperoleh kader-kader calon pemimpin yang mempunyai kemampuan di bidang politik.

Dalam beberapa partai politik di Indonesia salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang melakukan rekrutmen politik terhadap calon legislatif Kabupaten Sampang dengan menggunakan proses formalitas dan mengutamakan adanya kader partai tersebut. Prosedur formalitas ini dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan partai dan aturan Komisi Pemilihan Umum. Seperti adanya pendaftaran, pengumpulan data-data administrasi keterangan pendidikan, keterangan kependudukan, keterangan surat berperilaku baik dan keterangan yang lain. Jalur informal politik juga menjadi sebuah pertimbangan yang cukup penting karena secara sosiokultural perkembangan politik yang ada di Sampang memiliki pengaruh besar terhadap peranan kyai yang hingga saat ini masih diyakini oleh masyarakat Sampang (Rahmadania, 2014).

Ketokohan kyai yang kuat juga sangat berpengaruh dalam pertimbangan informalitas politik mengajukan daftar calon tetap pada dapil V yang didalamnya memiliki calon-calon yang masih berhubungan dengan keluarga kyai, disisi lain kecamatan yang terdapat pada dapil V terdapat pondok pesantren yang cukup banyak. Banyak calon anggota legislatif Partai PPP Dapil V berkompetisi untuk berusaha mendapatkan dukungan dari kyai hal ini di karenakan kyai berperan penting dalam perpolitikan di pesantren (Rahmadania, 2014).

Selain PPP salah satu partai yang bisa di golongankan sebagai partai baru dalam perpolitikan Indonesia juga memiliki pola tersendiri dalam rekrutmen calon legislatif, DPW Partai Nasional Demokrat Jawa Tengah Menggunakan

Sistem Merit (*Merit System*) dapat dilihat dari proses perekrutan dengan, beberapa tes dan kewajiban yang harus dimiliki dan dilalui oleh bakal calon benar-benar dilakukan sebagaimana mestinya, Partai Nasdem telah menggariskan berbagai kualifikasi maupun kewajiban yang tidak semua orang mampu melaksanakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen calon anggota legislatif pada Partai Nasional Demokrat Ada 2 (dua) Faktor yang mempengaruhi dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif Partai Nasional Demokrat, yaitu Faktor Internal dan Eksternal, Faktor Internal Mencakup dimensi kesisteman, dimana sistem dan bangunan struktural Partai NasDem itu sendiri memiliki pengaruh yang besar dalam menarik keanggotaan partai maupun rekrutmen calon anggota legislatif, kemudian dimensi Reifikasi, yaitu mengenai citra dan penilaian publik terhadap Partai NasDem. Selanjutnya faktor eksternal adalah faktor yang datang dari para bakal calon anggota legislatif, mengenai kualifikasi dan kepribadian masing-masing bakal calon anggota legislatif itu sendiri (Purwitasari, 2014).

Berdasarkan studi kasus di kedua partai di atas menyangkut pola rekrutmen calon legislatif dapat dikatakan kedua partai tersebut memiliki cara atau pola tersendiri dalam merekrut calon legislatif ataupun kadernya, dimana PPP masih sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek penokohan dari elite partai itu sendiri seperti pengaruh kyia dalam proses perekrutan politik. Hal ini sedikit berbeda dengan partai NasDem yang menggunakan beberapa tahap yang dipengaruhi oleh 2 faktor yang sangat diperhatikan dalam

merekrut keanggotaan ataupun calon legislatif baik itu dari faktor internal yang mencakup kesisteman dalam partai Nasdem sendiri, dalam faktor eksternal yang di pengaruhi oleh kepribadian masing-masing calon legislatif.

Kehadiran partai-partai politik baru dalam pemilu 2019 kali ini, selain menjadi bukti berjalannya ruas demokrasi dalam hal politik praktis juga akan menjadi hal menarik yang akan menambah warna kontestasi politik praktis Indonesia. Terutama bagi penulis, kehadiran Partai Solidaritas Indonesia (kemudian disingkat PSI) adalah suatu hal yang menarik, karena PSI lahir dengan pendekatan dan karakteristik yang sangat berbeda dari partai-partai yang pernah ada di Indonesia. PSI mengklaim sebagai partainya anak muda, sebagaimana terdapat aturan bahwa pengurus partai dibatasi usianya yakni maksimal 45 tahun dan pada saat ini kepengurusan yang ada di daerah rata-rata berusia 20-30 tahun.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No.14 tahun 2014. Partai solidaritas Indonesia sendiri diketuai oleh Grace Natalie, yang dimana Grace Natalie merupakan seorang mantan pembawa acara berita dan Jurnalis. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku lahir untuk merespon kecenderungan perubahan sosial-politik generasi baru tersebut. Generasi baru umumnya berharap lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya, berintegritas, peduli pada rakyat, dan kompeten. Sesuai dengan perubahan sosial itu, generasi politik baru cenderung menuntut kesetaraan dan inklusivitas politik yang lebih besar.

Karenanya, generasi baru cenderung menentang berbagai bentuk sentralisme dan hirarki politik yang panjang. Secara sadar, Partai Solidaritas Indonesia dibentuk dengan tidak bersandar pada satu tokoh sentral.

Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru konsisten dalam merekrut kepengurusannya yakni dari kaum pemuda dan perempuan, pengurusnya bukan bagian dari partai politik yang lama, dan tidak punya ketersambungan dengan kekuatan partai politik lama. Dengan demikian partai solidaritas Indonesia bisa secara konsisten melakukan gerakan politik yang sama sekali baru tanpa harus tersandera dengan kepentingan politik lama, klientalisme, rekam jejak yang buruk, beban sejarah dan citra yang buruk terhadap partai politik sebelumnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memang digolongkan sebagai partai yang menjadi pendatang baru di dunia politik akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa partai ini telah menjadi saingan bagi partai-partai politik lain di Indonesia terkhusus di Kabupaten Wajo. Melihat dari segi keanggotaannya yang hanya menfokuskan pada pemuda-pemudi yang bisa dikatakan memiliki jiwa kritis serta gagasan-gagasan baru yang menggebu-gebu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kemudian telah menjadi wadah bagi para generasi yang akan melanjutkan atau bahkan memperbaiki tatanan pemerintahan yang sudah ada, akan tetapi tidak semua pemuda memiliki kemampuan untuk menanggung tanggung jawab besar untuk menjadi wakil dari ribuan rakyat yang ada terkhusus di Kabupaten Wajo, maka dari itu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Kabupaten Wajo tidak asal menerima dengan mudah seseorang yang akan menjadi wakil masyarakat, mereka harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan partai ini guna menyaring orang-orang yang benar-benar mampu untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan partai itu sendiri, mereka harus melalui proses rekrutmen yang menjadi tolak ukur apakah mereka benar-benar pantas untuk mengembah amanah dan tanggung jawab sebagai pemuda dan kader partai yang memperjuangkan hak-hak masyarakat di Indonesia terkhusus di Kabupaten Wajo

Di kabupaten Wajo sendiri DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah memiliki banyak peminat di kalangan muda, terbukti dengan jumlah keanggotaannya mencapai 531 orang dan yang mendaftar calon legislatif sebanyak 12 orang pada lima dari enam daerah pemilihan (Dapil) di Kabupaten Wajo. Karena itu, menarik untuk melihat semangat baru Partai Solidaritas Indonesia ini khususnya di kabupaten wajo jika dibenturkan dengan pola rekrutmen dengan melihat bagaimana pola rekrutmen calon anggota legislatif yang akan dijalankan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum 2019 lalu.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pola rekrutmen politik yang menjadi acuan atau tolak ukur untuk menerima kader atau anggota partai yang di tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka penulis menggunakan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana Prosedur Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo, dan prosedur-prosedur yang dilakukan dalam proses rekrutmen calon legislatifnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan dapat pula memberi sumbangsi pemikiran tentang pola rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.
2. Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir mahasiswa-mahasiswa yang membacanya tentang pola rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk mendapat kekuasaan politik dan juga merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 2008).

Sigmund Neumann mendefinisikan partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berupaya untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan mendapat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Labolo, 2015).

Menurut pendapat Rusadi Kantaprawira, Partai politik adalah organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas serta petugas untuk mencapai suatu tujuan, memiliki ideologi (*political, doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective*), dan mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan jangka dekat sampai dengan jangka panjang serta memiliki ciri berupa keinginan berkuasa (Hamid, 2008).

Carl J. Fredrerik menerangkan bahwa Partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga masyarakat berdasarkan sejumlah cita-

cita, kehendak dan ideologi dengan tujuan mempengaruhi dan memenangkan penetapan kebijakan publik (Dryartaya, 2010).

Sedangkan menurut Roger Soltau partai politik ialah sekelompok warga negara yang terorganisir serta bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri (Ihyauddin, 2012).

Selain pendapat para ahli tersebut, pengertian partai politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, sebagai berikut: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian partai politik dari beberapa ahli tersebut seorang Hafied Cangara menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

- 1) Partai sebagai koalisi, yakni membentuk koalisi dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas.
- 2) Partai sebagai organisasi, untuk menjadi sebuah institusi yang dinamis, eksis, dan berkelanjutan partai politik harus dibina dan dibesarkan

sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok.

- 3) Partai sebagai pembuat kebijakan, partai politik mendukung secara konkret para calon yang diajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik, dan melalui itu partai politik sangat berpengaruh dalam penentuan sebuah kebijakan (Cangara, 2009).

Adapun partai politik memiliki beberapa fungsi, Miriam Budiarjo (2008) menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah

- 1) Sarana komunikasi politik
- 2) Sarana sosialisasi politik
- 3) Pengatur konflik
- 4) Rekrutmen politik

Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda Almond an Powell dalam Ilham (2015) menyebutkan ada tiga fungsi partai politik, yaitu:

- 1) Rekrutmen politik
- 2) Sosialisasi politik
- 3) Artikulasi dan Agregasi kepentingan.

Secara garis besar, Firmansyah (2011) menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal, dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang telah melatar belakangi pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik

terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab secara konstitusional, moral, serta etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat yang lebih baik.

B. Rekrutmen Politik Calon Legislatif

A. Rekrutmen Politik

Di era reformasi, rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik pada sebuah negara, supaya sistem politik dapat mengfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilaksanakan secara terbuka, semi tertutup, dan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen dapat ditentukan pada derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Adapun beberapa bentuk pilihan partai politik dalam melaksanakan proses rekrutmen politik sebagai berikut :

- 1) Partisipan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas yang tinggi terhadap partai agar bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- 2) *Compartmentalization*, adalah proses rekrutmen yang berdasarkan pada latar belakang pendidikan serta pengalaman berorganisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, seperti aktivis LSM.
- 3) *Immediate Survival*, merupakan proses perekrutan yang dilakukan oleh otoritas pimpinan sebuah partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.

- 4) *Civil Service Reform*, ialah proses rekrutmen berdasarkan kemampuan serta loyalitas seseorang calon sehingga dapat mendapatkan kedudukan yang penting atau tinggi (Ariwibowa, 2013).

Menurut Ramlan Surbakti dalam Waskita (2016) rekrutmen politik adalah sebagai seleksi dan pengangkatan atau pemilihan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan sejumlah peranan pada sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan secara khususnya.

Menurut Norris dalam Suyoto (2016) terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu meliputi sertifikasi, pendominasian, dan tahap pemilu. tahap pendefinisian kriteria yang bisa masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang memenuhi tahap sertifikasi meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan partai, serta norma sosial informal. Tahap penominasian calon meliputi ketersediaan yang telah memenuhi syarat serta permintaan dari penyeleksi dalam memutuskan siapa yang dinominasikannya. Sementara itu tahap pemilu merupakan tahap terakhir dalam menentukan siapa pemenang pemilu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 29 yang berbunyi :

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. anggota Partai Politik;

- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

B. Pola Rekrutmen Politik

Menurut Rush dan Althoff dalam Saputra (2012) Sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pertama rekrutmen terbuka, yaitu dengan menyediakan serta memberikan kesempatan yang sama pada seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilakukan melalui proses dan syarat-syarat yang telah ditentukan pula melalui beberapa pertimbangan yang objektif rasional. Dimana orang yang telah memenuhi syarat untuk

menduduki jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam melakukan kompetisi.

2. Kedua, rekrutmen tertutup ialah peluang untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara atau hanya orang-orang tertentu yang dapat mengisi jabatan politik.

Menurut Suharno (2004). Ada dua macam rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Dalam rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik, dsb) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintahan. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang di kenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya. Sebaliknya dalam rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok orang saja. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elit itu sendiri (Suharno,2004).

C. Prosedur Rekrutmen Politik

Prosedur atau tahapan dalam sebuah rekrutmen politik terkadang berbeda yang digunakan setiap partai politik, Rush dan Althoff, dalam penjelasan

tahapan rekrutmen politik dengan sifat terbuka menggunakan rumusan operasionalisasi konsep rekrutmen partai politik yaitu sebagai berikut:

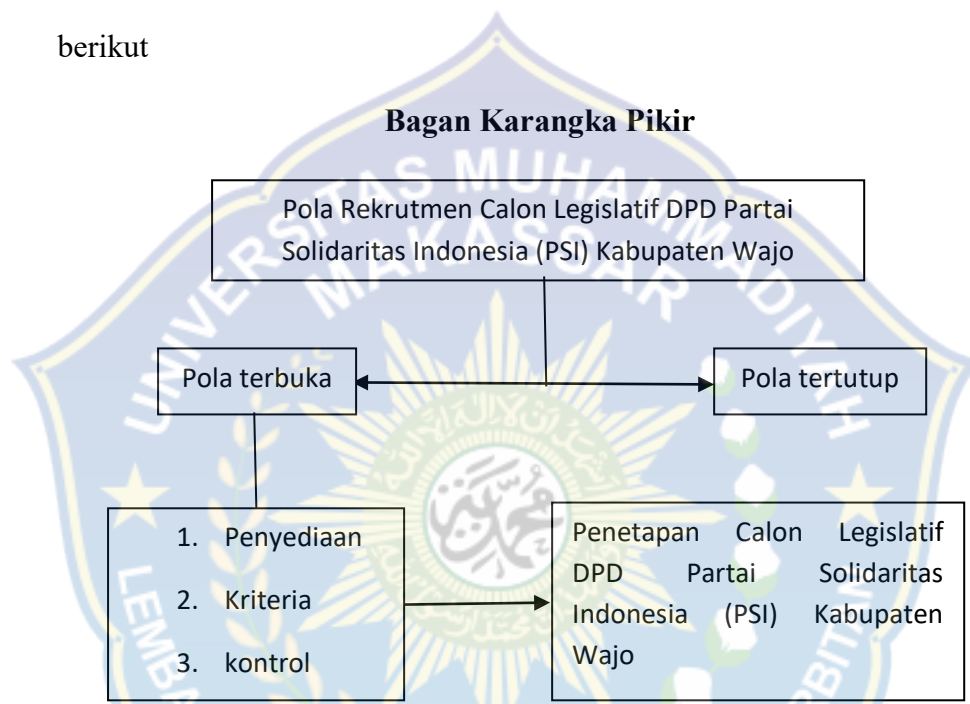
1. Penyediaan rekrutmen politik terhadap calon legislatif, merupakan tahapan awal yang dilakukan Partai Politik dalam pengrekrutan calon legislatif melalui:
 - a. Mekanisme rekrutmen calon legislatif yang dilakukan partai.
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen calon legislatif.
 - c. Sarana rekrutmen calon legislatif.
2. Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria calon legislatif oleh Partai Politik dielaborasi dengan kriteria untuk memilih dan menetapkan calon legislatif, antara lain yaitu:
 - a. Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
 - b. Popularitas, yaitu calon merupakan orang yang telah dikenal masyarakat luas serta memiliki reputasi yang baik.
 - c. Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus memiliki tingkatan pendidikan yang bagus minimal lulusan perguruan tinggi agar calon tersebut dapat memahami serta mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

- d. Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah memiliki modal yang cukup besar untuk digunakan ketika melakukan kampanye.
 - e. Akseptabilitas, yaitu penerimaan masyarakat kepada seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul saat masyarakat merasa calon tersebut merupakan orang yang betul-betul mampu menyuarakan kepentingannya.
 - f. Kapabilitas, yakni kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, lalu merumuskan aspirasi tersebut dalam bentuk pernyataan yang jelas dan menyampaikan hasil rumusan tersebut pada masyarakat.
3. Kontrol rekrutmen politik calon legislatif, adalah peran yang dikerjakan Partai Politik dalam mengontrol jalannya rekrutmen calon legislatif. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik ditujukan pada:
- a. Bakal calon legislatif dari internal partai.
 - b. Bakal calon legislatif dari eksternal partai.

Calon Anggota Legislatif itu sendiri merupakan orang yang nantinya akan bertugas untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Untuk menjadi calon anggota legislatif, seseorang harus menjalani proses rekrutmen calon anggota legislatif yang sudah ditetapkan oleh partai politik (Martini, 2013).

C. Kerangka Pikir

Untuk mengetahui bagaimana pola rekrutmen dan proseder rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam penelitian ini menggunakan teori pola rekrutmen dan prosedur rekrutmen dari Michael Rush dan Phillip Althoff dengan bagan seperti berikut



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pola Rekrutmen dan Prosedur Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian ini, maka dapat di kemukakan Deskripsi fokusnya yaitu:

1. Pola rekrutmen politik

Pola rekrutmen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola rekrutmen politik apa yang digunakan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam merekrut dan menetapkan bakal calon legislatif yang ingin bergabung dalam PSI.

2. Prosedur rekrutmen

Prosedur rekrutmen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pihak partai PSI atau bakal calon legislatif dalam proses rekrutmen dalam fokus ke penyediaan tahap untuk bakal calon legislatif dalam perekrutan, baik berupa mekanisme, waktu, tempat dan sarana perekrutan. Kriteria mencakup beberapa aspek seperti, usia, pendidikan, popularitas, keuangan dan finansial, askeptabilitas hingga kapabilitas bakal calon dan kontrol dalam artian melakukan kontrol dalam proses perekrutan baik itu dari segi internal partai maupun dari eksternal partai itu sendiri.

3. Calon Legislatif

Yang dimaksud calon legislatif dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk mengembah amanah yang diberikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menduduki suatu jabatan politik dengan tanggung jawab sebaga wakil dari masyarakat dalam pemerintahan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai 1 Desember 2018 s/d 1 Februari 2019. Adapun lokasi penelitian ini adalah kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo alasan penentuan lokasi ini terkait secara langsung dengan keberadaan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kabupaten Wajo itu sendiri memiliki kantor di kabupaten Wajo, tepatnya di Sengkang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Menurut Sugiyono (2013:5) Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disertai dengan gambar/foto dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Diharapkan bahwa apa yang terlihat dilapangan digambarkan secara rinci, jelas, dan akurat. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel sesuai dengan proses kerja yang terjadi dilapangan.

Sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

2. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, menurut penjelasan fenomologi yang artinya peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan berkaitan dengan Pola Rekrutmen dan Prosedur Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menetapkan calon legislatif di Kabupaten Wajo.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data primer yaitu hasil yang diperoleh melalui Observasi, wawancara, dokumen dan interaksi secara langsung dengan lingkungan tempat objek penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan atau dokumentasi atau berhubungan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling penting (urgen) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2013:126) adalah salah satu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini, adalah orang

tersebut yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, namun jumlah untuk informan penelitian yang mendalami masalah dalam penelitian ini dianggap terlalu banyak sehingga peneliti mengambil informan melalui teknik *Snowball* sampling.

Tabel 3.1 Informan

No.	Nama	Inisial	Jabatan/instansi	Jumlah
1.	Firmawan Hergan, S.E	FH	Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab Wajo	1 orang
2.	Muh. Rusliadi	MR	Pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab Wajo	1 orang
3.	Suherman, ST	SN	Anggota DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab Wajo	1 orang
4.	H. Andi Jumaeri, S.H	AJ	Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab Wajo	1 orang
5.	Mustina, S.Si	MN	Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab Wajo	1 orang
6.	Sri Wahyu Handayani	SW	Tokoh Pemuda	1 orang
7.	Andi Fausi Rafzanjani	AF	Tokoh Pemuda	1 orang
8.	Andi Arifin	AA	Tokoh Masyarakat	
9.	Muh.Amri	MA	Tokoh Agama	1 orang
Total Informan				9 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pada data obyektif. Oleh karena itu sangat perlu diperhatikan teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai alat

pengambil data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah:

1. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah, untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menetapkan Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Wajo.
2. Observasi Yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, peristiwa dan aspek-aspek yang akan diteliti di lokasin penelitian. Obsevasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang bagaimana Bentuk Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam mempelajari Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menetapkan Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Wajo atas kebenaran informasi yang diperoleh dari informan.
3. Dokumentasi yaitu cara menelaah dokumen melalui kajian literature dan undang-undang, dokumen, surat-surat keputusan, majalah, dan surat kabar yang terkait dengan Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menetapkan Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Wajo.

F. Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu aktifitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan dapat ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktifitas dalam analisis meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data berti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah meyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Kualitas suatu data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu :

- a. mengecek *representativeness* atau keterwakilan data.
- b. mengecek data dari pengaruh peneliti.
- c. mengecek melalui triangulasi.

- d. melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang dapat dipercaya.
- e. membuat perbandingan atau mengkontraskan data
- f. menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti. Temuan tersebut berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau dugaan sementara.

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna pengecekan silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber:

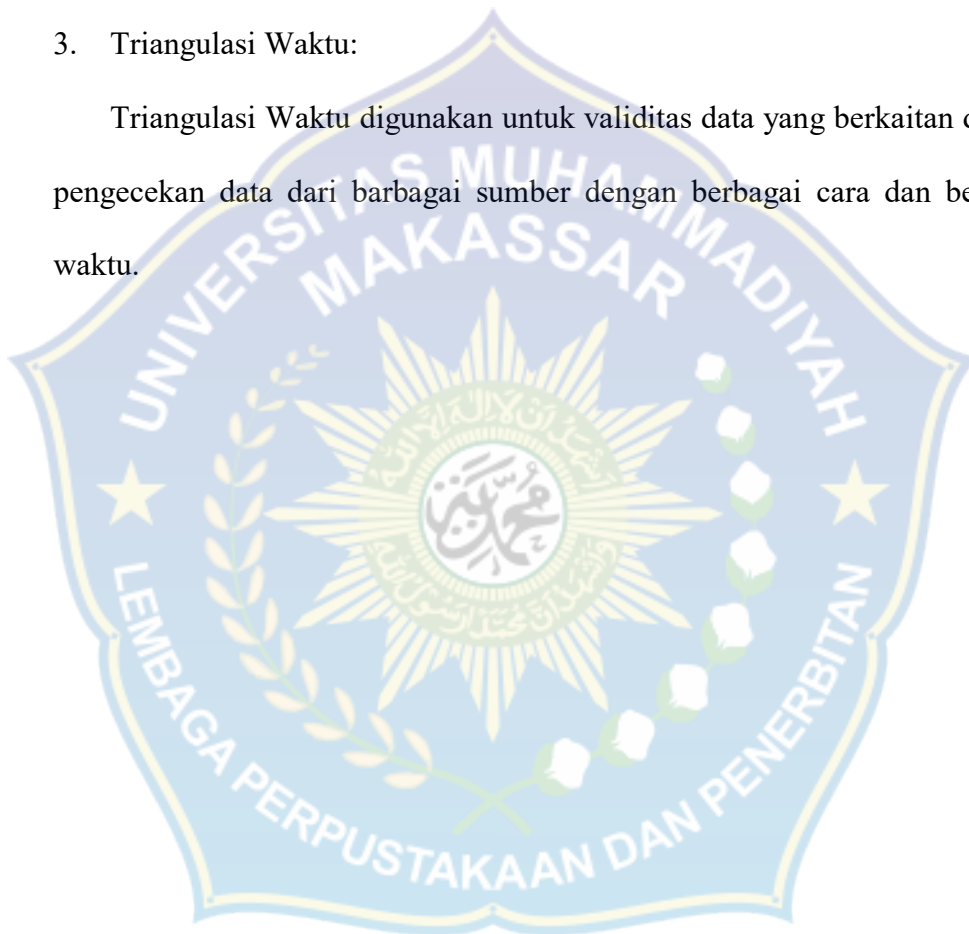
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi Metode:

Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari suatu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji keakuratan atau ketidakakuratan dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang lain.

3. Triangulasi Waktu:

Triangulasi Waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakterik Obyek Penelitian

1. Gambaran Wilayah Kabupaten Wajo

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang (Wajo – Wajo), bahasa Bugis, artinya pohon Bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo.

Ada versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit) oli' (kulit). Konon kabarnya dia dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakkoli (sakke'=puluh; oli=kulit) sehingga dia sembuh. Saat dia sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru, hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone (ada juga yang mengatakan Soppeng) yang beristirahat di dekat perkampungan We Tadampali. Singkat kata mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem *to manurung* sebagaimana kerajaan-

kerajaan di Sulawesi selatan pada umumnya. Tipe Kerajaan Wajo bukanlah feodal murni murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi.

Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman La Tadampare Puang Ri Maggalatung Arung Matowa, yaitu raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matowa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Soppeng terlebih dahulu memeluk agama Islam.

Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar (Gowa Tallo) dengan Kerajaan Bugis (Bone, Wajo dan Soppeng) yang membentuk aliansi *Tellumpoccoe* untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bone dan Soppeng berpihak ke Belanda. Saat Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Soppeng, VOC dan Buton, Arung Matowa Wajo pada saat itu, akibatnya pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo, tepatnya Benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone, di bawah pimpinan Arung Palakka. Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Hingga saat datangnya La Maddukkelleng Arung Matowa Wajo, Arung Peneki, Arung Sengkang, Sultan Pasir, dialah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar *Petta Pamaradekangngi Wajo* (Tuan yang memerdekakan Wajo

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan. Ibukotanya Sengkang, sekitar 242 km dari kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan), dapat ditempuh sekitar 4 jam dengan menggunakan mobil. Dari kota Parepare, pusat kawasan pengembangan ekonomi terpadu di propinsi Sulawesi Selatan, sekitar 87 km. Wajo yang luas wilayahnya 250.619 hektar, terbagi atas 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 128 desa, memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3° 39' - 4° 16' LS dan 119° 53' - 120° 27' BT. Luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km² atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%).

Tabel 4.2 Jumlah penduduk 14 kecamatan

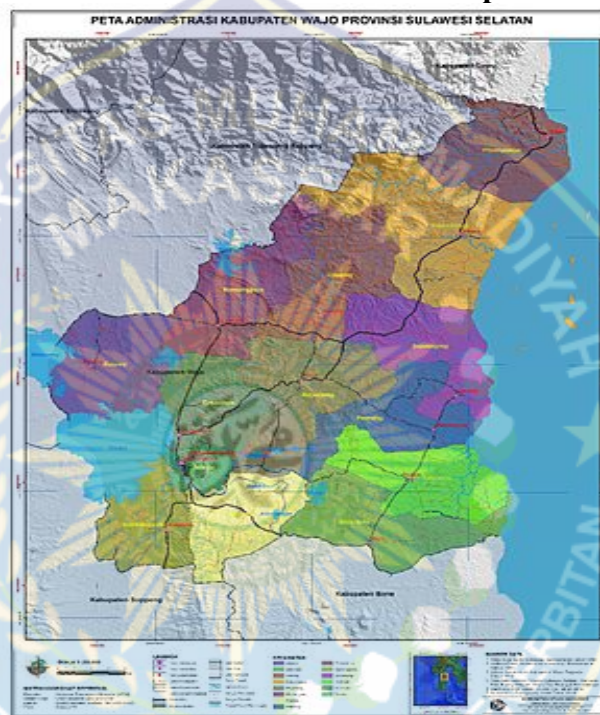
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Sabbangparu	25864	25931	25996	26051	26109	26158	26209	26247	26294
Tempe	61275	61870	62465	63040	63629	64200	64780	65335	65914
Pammana	31300	31381	31460	31527	31597	31656	31718	31764	31821
Bola	19444	19495	19544	19585	19629	19665	19704	19732	19768
Takkalalla	20675	20728	20781	20824	20871	20910	20951	20981	21019
Sajoanging	18735	18784	18831	18871	18913	18948	18985	19013	19047
Penrang	15577	15618	15657	15690	15725	15755	15785	15808	15837
Majauleng	31302	31383	31462	31529	31599	31658	31720	31766	31823
Tanasitolo	39400	39499	39596	39677	39764	39835	39911	39966	40035
Belawa	32021	32104	32185	32253	32325	32386	32449	32496	32554
Maniangpajo	16061	16102	16143	16177	16213	16244	16275	16299	16328
Gilireng	11067	11115	11162	11205	11251	11291	11333	11370	11410
Keera	21803	21896	21988	22071	22158	22236	22317	22386	22464
Pitumpanua	41800	41909	42014	42103	42197	42276	42358	42420	42496

Sumber : kabupaten Wajo Dalam Angka 2017

Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng.
- Sebelah Timur : Teluk Bone.
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten wajo



Karakteristik potensi alam Wajo, seperti diungkapkan oleh Arung Matoa Wajo, La Tadampare Puang Ri Maggalatung (1491-1521) : mangkalungu ri bulu'E, massulappe ripottanangngE ma matodang ritasi'E, ri tapparengngE. Artinya : daerah ini merupakan negeri yang subur dan nyaman. Ibarat seorang tidur, maka ia berbantalkan gunung dan hutan, memeluk lembah, dan kakinya menyentuh danau atau air laut. Ungkapan cendikiawan Wajo di abad ke-15 itu memang bukan syair khayalan, namun merupakan suatu kenyataan yang

hingga kini menjadi potensi andalan Kabupaten Wajo. Pada tahun 1957 sistem kepemimpinan pemerintahan berubah menjadi Bupati hingga pada saat ini. Adapun nama-nama Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Wajo diantaranya.

1. Andi Tandjong (1957 – 1960)
2. Andi Magga Amirullah (1960 – 1962)
3. Andi Bachtiar (1962 – 1962)
4. Andi Hasanuddin Oddang (1962 – 1967)
5. H. A. Unru (1967 – 1978)
6. Rustam Effendi (1978 – 1985)
7. Prof. Dr. Radi A. Gany (1985 – 1993)
8. Drs. H. Dachlan Maulana M.S. (1993 – 1999)
9. Drs. Naharuddin Tinulu M.M (1999 – 2004)
10. Kolonel (Purn) H. Andi Asmidin (2004 – 2009)
11. Drs. H. Andi Burhanuddin Unru M.M (2009 – 2019)
12. Dr. H. Amran Mahmud S.Sos.,M.Si. (2019 - - - - -)

2. Gambaran Umum Partai Solidaritas Indonesia(PSI)

Partai Solidaritas Indonesia adalah kekuatan politik baru yang ingin mengembalikan politik ke tempat yang terhormat. PSI lahir dari kesadaran bahwa politik adalah sebuah tugas mulia untuk mewujudkan kebahagiaan bagi semua orang. Atas dasar itulah PSI bertekad mengakhiri sengkabut politik hari ini dengan mengembalikan politik kepada nilainya yang luhur. PSI ingin mendekatkan kembali politik dengan nilai-nilai kebajikan agar lahir

NEGARAWAN yang seluruh pikiran dan tindakannya didasarkan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara Indonesia, bukan sekedar kepentingan pribadi politik jangka pendek.

PSI sebagai partai baru tidak lagi tersandera dengan kepentingan politik lama, klientalisme, rekam jejak yang buruk, beban sejarah dan citra yang buruk terhadap partai politik sebelumnya. PSI memberikan porsi yang besar pada perempuan, sehingga gerakan politik PSI tidak hanya sekedar memenuhi syarat 30% persen perempuan, tapi juga seluruh keputusan politiknya diambil melalui keterlibatan aktif perempuan di dalamnya.

PSI secara konsisten memisahkan antara dua hal yang selama ini kadang menjadi kabur, antara mengurus partai dan mengurus politik. Sejak awal PSI telah memisahkan struktur politik dengan struktur administratifnya. Tidak akan terjadi politisi mengurus administrasi partai lalu menggunakannya untuk kepentingan kekuasaan, karena partai akan diurus oleh orang-orang muda profesional yang paham betul bagaimana mengurus organisasi yang modern, profesional, bersih dan transparan.

Arti dan makna logo PSI adalah sebagai berikut:

- a. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas, dan kekuatan.
- b. Tulisan PSI merupakan singkatan dari Partai Solidaritas Indonesia. Dengan huruf “P” yang terbuka, ini menunjukkan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi semua golongan dan kalangan.

- c. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional dengan gagasan demokratis substantif yang juga termaktub dalam UUD 1945.
- d. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila, dan tiga kelopak dalam menunjukkan Trisakti.
- e. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimisme, pantang menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
- f. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang mencoba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia.

Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia

Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.

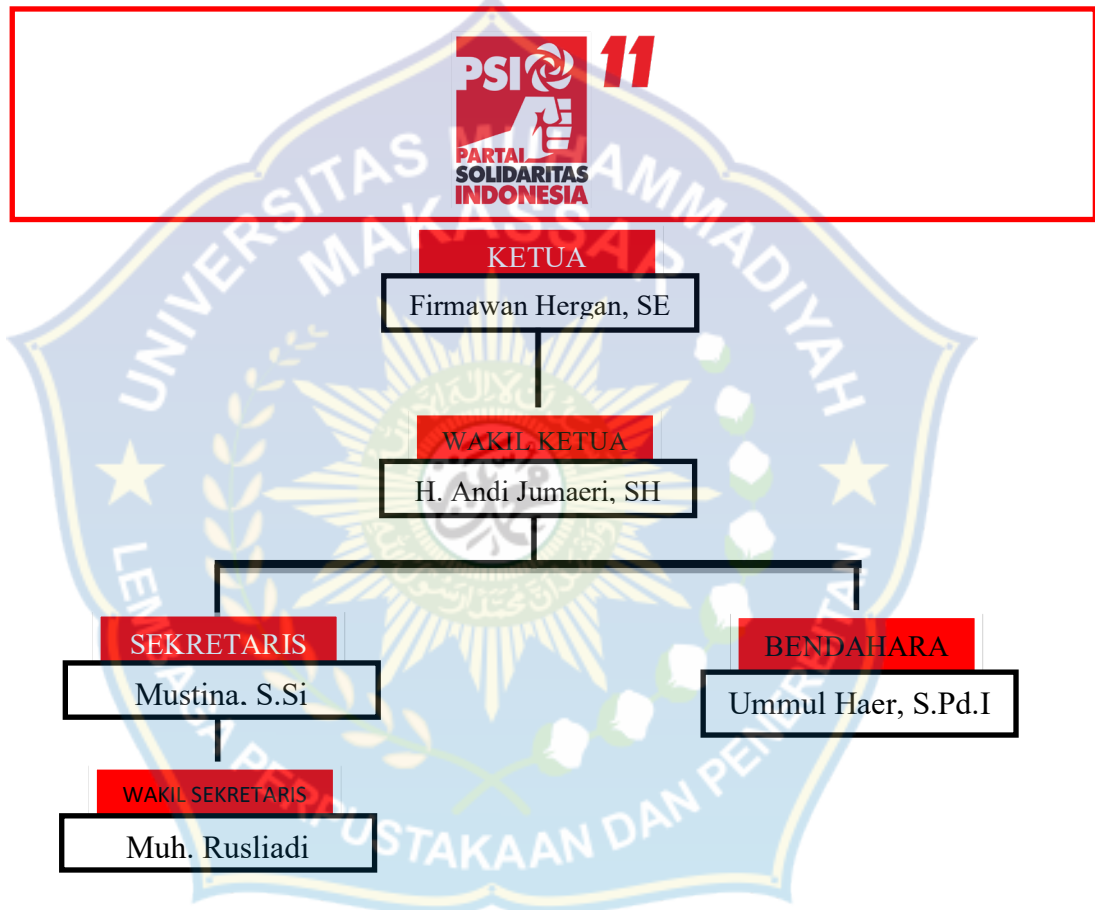
Misi PSI adalah:

- a. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir, dan terstruktur.
- b. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
- c. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

- d. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

Struktur Organisasi Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Wajo

Gambar 4.2 Struktur Pimpinan Daerah PSI Kabupaten Wajo



B. Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia(PSI) Di Kabupaten Wajo

Partai Solidaritas Indonesia(PSI) adalah kekuatan politik baru yang lahir dengan tekad mengakhiri sengkabut politik hari ini dengan mengembalikan politik kepada nilainya yang luhur. Dengan lebih mengfokuskan kepada anak muda dan kaum perempuan untuk bersama memberikan kontribusi yang maksimal untuk Indonesia. Adapaun beberapa hal yang ingin diperangi PSI yaitu korupsi yang merajalela dikalangan pejabat pemerintahan dan sikap intoleran yang semakin hari semakin menjadi masalah di Indonesia.

Dengan tekad yang kuat PSI dalam memperjuangkan tujuannya sangat membutuhkan partisipasi dari kalangan anak muda yang dinilai memiliki gagasan yang baru dan semangat yang masih membara untuk perubahan, maka dari itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang di bentuk oleh tokoh perempuan Grace Natalie dkk dalam melakukan rekrutmen politik di setiap daerah yang ada di Indonesia lebih mengfokuskan kepada anak muda.

Salah satu DPD PSI yang menjadi obyek penelitian adalah DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo terkait pola rekrutmen calon legislatifnya dengan pendekatan teori dan hasil wawancara dengan pihak partai. Adapun pola rekrutmen yang dipakai yaitu :

1. Pola Terbuka

Dalam rekrutmen politik setiap partai politik menggunakan pola rekrutmen tertentu yang menurut mereka efisien dalam melakukan rekrutmen, tidak

terkecuali dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam melakukan rekrutmen politiknya juga menggunakan pola rekrutmen. Hal ini di perjelas dengan penelitian kepada salah satu DPD PSI yaitu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.

Dalam penelitian terkait pola rekrutmen DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo, hal ini terjawab dengan hasil wawancara dengan pihak partai seperti berikut :

“Proses rekrutmen kami menggunakan pola terbuka, karena kami dari PSI memberikan kebebasan kepada siapa saja yang ingin mendaftarkan diri, bagi yang ingin silahkan masuk ke website resmi PSI dan silakan mendaftar, kami terbuka kepada masyarakat”. (wawancara dengan FH).

Keterbukaan sebuah partai politik kepada masyarakat dalam proses rekrutmen menjadi poin penting dalam pandangan masyarakat dan juga menimbulkan citra baik kepada masyarakat bagi partai dengan menimbulkan pemahaman kepada masyarakat bahwa partai tersebut tidak hanya menerima elit-elit tertentu. Hal ini pun di benarkan dengan wawancara dengan pihak partai lain seperti berikut :

“Kami terbuka untuk masyarakat apalagi dari kalangan anak muda kaena memang PSI ini adalah partai yang ingin terbuka kepada masyarakat, bukan Cuma dalam proses rekrutmen akan tetapi bisa dibilang semua terbuka terbukti dengan segala informasi dari PSI bisa di dapat dalam wabsite resmi PSI” (Wawancara dengan MR).

Terbukanya proses rekrutmen politik dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui bahkan terlibat langsung dengan proses rekrutmen seperti yang dilakukan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses rekrutmennya. Hal ini juga dibenarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Calon Legislatif seperti berikut:

“PSI ini terbuka bahkan dalam prosesnya rekrutmennya orang bisa mendaftarkan diri tanpa harus ke kantornya hanya melalui online saja, hanya saja untuk verifikasi berkasnya dilakukan di kantor di yang ada di Sengkang” (wawancara dengan AJ).

Dari hasil wawancara dengan ketiga orang yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo diatas dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo adalah pola rekrutmen terbuka dengan memberikan kebebasan kepada siapapun yang ingin bergabung atau menjadi calon legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dan hal inipun dilakukan baik dari PSI Pusat dan PSI Wilayah karena memang secara umum PSI adalah partai yang terbuka untuk masyarakat.

2. Pola Tertutup

Pola tertutup adalah kebalikan dari pola terbuka dimana ketika partai politik menggunakan pola tertutup dalam rekrutmen politiknya hanya akan menguntungkan segelintir elit saja karena hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut terlibat dalam proses rekrutmennya. Hal ini sangat bertentangan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) karena salah satu yang ingin PSI ubah adalah pola-pola seperti ini yang hanya menguntungkan segelintir elit saja dan Partai Solidaritas Indonesia dibentuk dengan tidak bersandar pada satu tokoh sentral.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo juga tidak sepakat dengan partai yang menggunakan Pola Rekrutmen Tertutup dalam proses

rekrutmennya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak partai seperti berikut :

“Saya secara pribadi tidak sepakat dengan partai yang menggunakan pola tertutup dalam rekrutmennya karena besar kemungkinan terjadinya jual beli jabatan ketika menggunakan hal seperti itu” (wawancara dengan SH).

Dalam proses rekrutmen yang menggunakan pola tertutup juga biasanya sangat dipengaruhi oleh elit-elit tertentu dalam penetapan atau penerimaannya. Berbeda dengan Partai Solidaritas Indonesia yang murni ingin menerima siapapun yang ingin bergabung dengan partai tanpa ingin tersandra dengan kepentingan-kepentingan elit tertentu. Hal ini juga di paparkan dalam hasil wawancara dengan pihak partai seperti berikut:

“Kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesiabertumpu pada prinsip kepemimpinan demokratis yang realistik, yakni poliarki atau kepemimpinan oleh banyak orang, Partai Solidaritas Indonesia ini milik kami semua bukan milik segelintir orang maka dari itu dalam proses rekrutmen kami tidak menggunakan pola tertutup yang hanya menguntungkan segelintir orang saja” (Wawancara dengan FH).

Prinsip kepemimpinan demokratis yang diterapkan Partai Solidaritas Indonesia kepemimpinan partainya bertumpu pada prinsip kepemimpinan demokratis yang realistik, yakni poliarki atau kepemimpinan oleh banyak orang. Ketua partai tidak diberi insentif untuk menjadi pemimpin nasional demi menghindari politisasi partai untuk kepentingan sang pemimpin sendiri, yang didorong untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat di DPR/DPRD adalah siapa saja yang memenuhi kriteria kepemimpinan, bukan pucuk pimpinan partai di pusat maupun daerah. Partai Solidaritas Indonesiadan pengurusnya hanya melahirkan dan mengorganisir pemimpin-pemimpin tersebut untuk menjawab harapan generasi politik baru. Tidak seperti partai-partai lainnya

yang dianggap secara umum mengandalkan seorang tokoh tunggal atau segelintir elite, Partai seperti milik keluarga.

Dari pembahasan di atas terkait pola rekrutmen politik yang dilakukan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dapat disimpulkan bahwa DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo bahkan Partai Solidaritas Indonesia secara umum menggunakan pola rekrutmen terbuka dalam proses rekrutmennya dengan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara khususnya di Kabupaten Wajo yang ingin terlibat dan menjadi calon legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya dan tidak menggunakan pola rekrutmen tertutup karena memang pola rekrutmen tertutup tidak sejalan dengan prinsip kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri dimana pola tertutup hanya akan menguntungkan segelintir elit saja.

3. Prosedur Rekrutmen

Prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses rekrutmen politik terkadang berbeda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Untuk mengetahui prosedur atau tahapan-tahapan yang dilakukan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam merekrut calon legislatifnya penulis menggunakan pendekatan teori dari Rush dan Althoff dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, Rush dan Althoff dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik dengan sifat terbuka menggunakan rumusan operasionalisasi konsep rekrutmen partai politik yaitu penyediaan, kriteria dan kontrol.

1. Penyediaan

Pada penelitian ini penyediaan yang dimaksud adalah bagaimana suatu lembaga menyediakan hal-hal yang akan di jadikan bahan untuk suatu kegiatan tertentu. Dalam pelaksanaan Rekrutmen politik yang di laksanakan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo juga melakukan penyediaan untuk calon-calon legislatifnya yang di bagi menjadi tiga tahap, di antaranya :

a. Mekanisme

Mekanisme adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya. Dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo juga haruslah melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh partai, seperti yang di katakana ketua umum DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Wajo dalam wawancara yang telah dilakukan.

“Benar kami pun memiliki mekanisme tersendiri, pada tahap awal kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media terkait penerimaan bakal calon legislatif, setelah itu bagi yang ingin mencalonkan membawa berkas ke kantor untuk di verifikasi oleh tim yang sudah di siapkan dan tidak memungut biaya seperserpun dari yang ingin mendaftar.”
(wawancara dengan FH).

Terkait dengan pernyataan di atas bahwa dalam proses rekrutmen politik DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo ada beberapa mekanisme yang harus di lalui oleh bakal calon legislatif yang telah di tentukan oleh partai yang telah diedarkan ke setiap DPW dan DPD dari Partai Solidaritas

Indonesia Pusat yang menjadi pedoman dalam melakukan rekrutmen, hal ini di benarkan oleh informan dari pihak calon legislatif sebagai berikut:

“Mekanisme yang dilakukan setiap partai pasti memiliki tahap-tahap tertentu seperti saya misalkan kemarin hanya mendaftar melalui media kemudian ke kantor membawa berkas kemudian di kantor di uji oleh tim yang disiapkan oleh Partai Solidaritas Indonesiadan tim pengujinya berisi akademisi, pemuda, ada juga dari kalangan masyarakat.” (wawancara dengan AJ).

Dari hasil wawancara dengan pihak calon legislatif yang membenarkan tahap-tahap yang harus dilalui bakal calon juga mendapatkan respon yang baik dari tokoh pemuda yang ada di Wajo, berikut wawancara mengenai tanggapan pemuda di Wajo terkait mekanisme yang harus dilalui oleh bakal calon legeslatif :

“Terkait proses perekrutan calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia saya fikir cukup baik dikarnakan diseleksi oleh tim yang mayoritas dari eksternal partai, terutama adanya kalangan pemuda dan masyarakat yang dijadikan tim penyeleksi jadi bisa dikatakan bahwa ini sebagai simulasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya.” (wawancara dengan SW).

Adapun mekanisme yang yang menjadi pedoman dalam melakukan rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo semua berasal dari surat edaran yang dikeluarkan pimpinan Partai Solidaritas Indonesia pusat, hal ini seperti yang dikatakan pihak partai lain seperti berikut :

“Kami haanya mengikuti prosedur yang ada karena semuanya yang penting telah diatur oleh pusat terkait mekanisme rekrutmen caleg, dan yang paling ditekankan adalah bagaimana tanggapan bakal calon terkait koruPartai Solidaritas Indonesiadan kebhinekaan di indonesia” (wawancara dengan MR).

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan di atas, masing-masing dari pihak Partai, Calon legislatif dan dari pihak pemuda dapat disimpulkan bahwa terkait proses rekrutmen politik DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Wajo haruslah melalui beberapa tahap dan mekanisme tertentu yang harus dilalui oleh bakal calon seperti pendaftaran, verifikasi berkas, seleksi dari tim yang disiapkan hingga penentuan lolos atau tidaknya bakal calon dan hal inipun sesuai dengan surat edaran dari Partai Solidaritas Indonesia Pusat ke setiap DPW dan DPD Partai Solidaritas Indonesia. surat edaran inipun dan proses rekrutmennya terlampir pada halaman lampiran skriPartai Solidaritas Indonesiaini.

b. Waktu dan Tempat

Setiap kegiatan yang akan dilakukan haruslah memiliki jadwal tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu, baik itu lokasi, tanggal dan tempatnya semuanya haruslah telah tetapkan agar segalanya berjalan sesuai prosedur yang ada. Dalam proses rekrutmen politik sendiri haruslah di tetapkan tempat dan waktu agar mempermudah segala sesuatunya dalam tahap-tahap yang telah ditentukan. Terkait pola rekrutmen calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo mengenai tempat dan waktu yang telah disediakan oleh pihak partai tidaklah mempersulit bakal calon yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, seperti yang dikatakan pengurus partai sendiri dalam wawancara sebagai berikut:

“Persoalan waktu dan tempat tidaklah begitu mempersulit bakal calon, selama tidak begitu dekat dengan pendaftaran di KPU kami selalu membuka pendaftaran di media, hanya saja verifikasi dan seleksinya haruslah

dilakukan di kantor sendiri, mengenai waktunya kami infokan kepada bakal calon untuk datang ke kantor membawa berkasnya.” (wawancara dengan MR)

Hasil wawancara dengan MR juga tidak terlalu berbeda dengan hasil wawancara dari pihak pengurus yang lain terkait waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmennya yang sebenarnya pihak partailah yang menentukan segala aspek mengenai waktu pelaksanaan maupun tempat pelaksanaannya dan bakal calon hanya menunggu informasi yang di berikan oleh pihak partai selaku pelaksana kegiatan, berikut hasil wawancara dengan pengurus partai lainnya:

“Masalah waktunya kami infokan 2 hari sebelumnya kepada bakal calon yang telah mendaftar di media untuk kami arahkan ke kantor untuk tahap selanjutnya.” (wawancara dengan FH)

Terkait waktu dan tempat dalam proses rekrutmen politik memang partailah yang memiliki hak dan kewajiban untuk menentukannya dan bagi bakal calon mau tidak mau haruslah mengikut dengan apa yang telah ditetapkan oleh pihak partai, hal ini berdasarkan wawancara dengan pihak calon legislatif seperti berikut :

“Setelah mendaftarkan diri, kami tinggal menunggu konfirmasi atau info selanjutnya dari pihak partai kapan dan dimana tahap selanjutnya akan dilaksanakan, tapi kemarin kami berkumpul di kantor Partai Solidaritas Indonesia untuk tahap selanjutnya.” (wawancara dengan MN)

Dari wawancara ke tiga informan inilah dapat disimpulkan bahwa pada penentuan waktu dan tempat dalam proses rekrutmen di tentukan oleh pihak partai dan bakal calon hanya menunggu informasi dari pihak partai, selebihnya segala kegiatan dilakukan di kantor DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.

c. Sarana

Dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik haruslah baik sarana dan prasarana yang disediakan oleh partai politik sebagai hal yang menjamin kenyamanan dan kemudahan bakal calon yang ingin mendaftarkan dirinya. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses rekrutmen juga memberikan sarana yang baik bagi bakal calonnya, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak calon legislatif dari partai ini sendiri, berikut hasil wawancara dari salah satu calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia:

“Masalah sarana perekrutan Partai Solidaritas Indonesia sebenarnya tidak begitu sulit karena apa yang di butuhkan bisa dibidang disediakan, tinggal mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, contoh ada situs tertentu, dan ada kantor di Sengkang, tinggal jalani prosedur saja.” (wawancara dengan AJ)

Sarana dalam setiap kegiatan tentulah sangat penting untuk diperhatikan bukan sebagai salah satu daya tarik bagi produsen melainkan pula demi berjalannya kegiatan dengan lancar dari pertama hingga kegiatan itu sampai pada tujuan dilaksanakannya, dengan mengacu pada hal itu DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses rekrutmen calon legislatifnya berusaha semaksimal mungkin memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi orang-orang yang ingin mencalonkan sebagai calon legislatif melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hal ini dikatakan oleh pihak partai dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Kami sendiri dari pihak partai selalu berusaha memberikan kenyamanan dalam proses rekrutmen, mungkin salah satunya dengan penyediaan sarana yang baik bagi bakal calon” (wawancara dengan SN)

Penyediaan sarana dalam setiap kegiatan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam menilai sebuah lembaga, terkait kenyamanan dan kemudahan dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan dari hasil wawancara dari kedua pihak di atas baik itu dari pihak partai ataupun pihak calon legislatif mengenai saranan dalam proses rekrutmen calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dapat disimpulkan bahwa dalam proses rekrutmen calon legislatifnya pihak Partai Solidaritas Indonesia sangatlah memperhatikan sarana yang di sediakan sebagai hal yang menjamin kenyamanan dan kemudahan bagi orang-orang yang ingin menjadi wakil rakyat melalui Partai Solidaritas Indonesia di Kab. Wajo. dan dengan disediakannya saranan yang baik pihak bakal calonpun dapat lebih nyaman dan muda melaksanakan segala tahap-tahap dalam proses rekrutmen calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Wajo.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses perekrutan calon legislatif yang akan menjadi perwakilan partai dalam pemerintahan dapat disimpulkan bahwa dalam perekrutannya DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo memperhatikan tiga hal dalam satu aspek penyediaan, baik itu dari hal mekanisme perekrutan yang mempermudah bakal calon dengan memberikan sosialisasi melalui media tertentu hingga pada verifikasi berkas yang dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan oleh pihak partai baik itu dari kalangan akademisi, pihak partai dan tokoh masyarakat sendiri. Selain memperhatikan tahap-tahap mekanisme perekrutan, pihak partai juga

memperhatikan hal yang sangat mendasar seperti waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen yang dimana selama belum ada informasi dari KPU selama itupula pendaftaran calon legislatif masih dibuka bagi orang-orang yang ingin terjun dalam dunia politik pemerintahan, dan bagi sarana dalam proses rekrutennya pihak partai sendiri sebisa mungkin menyediakan sarana yang baik bagi bakal calon demi mempermudah dan memberi kenyamanan bagi bakal calon dalam menjalani tahap-tahap rekrutmen yang di tetapkan oleh partai.

2. Kriteria

Dalam segala bentuk penyeleksian atau perekrutan sebuah lembaga pastilah memiliki kriteria-kriteria yang di tetapkan untuk orang-orang yang ingin bergabung dalam lembaga tersebut. Kriteria sendiri adalah suatu patokan sifat atau karakteristik yang ditetapkan sebagai alat perbandingan bagi karakteristik-karakteristik lainnya, pula sebagai tolak ukur hal-hal yang menjadi persyaratan dalam suatu perekrutan.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo juga memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk lolos sebagai calon legislatif partai, pihak Partai Solidaritas Indonesia juga memperhatikan berbagai kriteria yang menjadi acuan untuk merekrut anggota maupun calon legislatifnya. Dalam proses rekrutmen ada beberapa kriteria yang menjadi acuan diantaranya :

a. Usia

Usia adalah batasan umur yang dimiliki manusia dalam hidupnya baik itu dikatakan usia muda ataupun usia tua. Dalam rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia kriteria atau faktor usia menjadi sangat penting dikarenakan sejak awal Partai Solidaritas Indonesia secara umum hanya mengisi anggota-anggotanya dengan orang-orang yang berusia muda sebagai perbandingan nilai produktif seseorang dan memang partai ini bisa dikatakan adalah partai anak muda. Dalam beberapa wawancara dengan pihak partai hal ini di benarkan, berikut hasil wawancara dengan pihak Partai Solidaritas Indonesia:

“partai kami bisa dikatakan partainya anak muda karena memang kami memfokuskan menerima anggota dari kalangan anak muda apalagi untuk calon legislatif rata-rata dari kalangan anak muda.” (wawancara dengan FH).

Usia menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam segala aspek untuk bergabung dalam sebuah lembaga ataupun perusahaan dikarenakan adanya beberapa peraturan yang membatasi usia bagi orang-orang yang ingin bergabung. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam merekrut keanggotaan memberikan batasan usia bagi orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota partai apalagi menjadi calon legislatif. Hal ini di konfirmasi dari wawancara dengan pihak-pihak pengurus partai lainnya, sebagai berikut:

“Ada batasan usia yang kami tetapkan dalam merekrut anggota ataupun caleg, mulai dari usia 21-45 tahun yang kami prioritaskan dan kami membuka diri bagi orang-orang baru yang ingin terjun ke politik karena memang kami tidak menerima bekas politisi dari partai lain.” (wawancara dengan MR)

Batas usia dalam perekrutan anggota dan calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia(PSI) menjadi kriteria yang tidak jauh berbeda dengan partai lain dimana usia produktif sekitaran 21-45 tahun yang diprioritaskan, dengan dasar

bahwa usia muda adalah usi dimana manusia memiliki semangat yang menggebu-gebu dalam menjalankan sesuatu termasuk menjadi wakil rakyat dalam pemerintahan, merekrut usia muda untuk menjadi calon legislatif sebenarnya memiliki kelebihan maupun kekurangan, memang diusia muda manusia memiliki semangat yang tinggi akan tetapi bila ditinjau dari aspek pengalaman anak muda sangat minim pengalaman dalam dunia politik dikarenakan mereka masih baru dalam dunia politik, akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun calon legislatifnya, justru ini menjadi tantangan tersendiri bagi calon legislatif dari partai in. dalam wawancara dari pihak calon legislatif mengenai hal ini seperti berikut:

“Partai Solidaritas Indonesia memang menfokuskan bagi usia muda, saya sendiri masih berumur 25 tahun, akan tetapi bukan berarti ini menjadi masalah akan tetapi ini menjadi kekuatan kami, memang kan Partai Solidaritas Indonesia partainya anak muda, semuanya orang baru dalam perpolitikan.” (wawancara dengan AJ)

Anak muda adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan orang tua, generasi milineal yang akan menjadi pelakon baru sejarah. Dalam hal ini kaum muda yang memberanikan diri terlibat dalam dunia politik melalui partai-partai politik akan memberikan kontribusi sebanyak mungkin bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan wadah bagi kaum muda untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia dari segi politik. Kriteria usia yang di tetapkan partai dalam merekrut anggota maupun calon legislatifnya mendapat dukungan dari pihak pemuda yang ada di Kabupaten Wajo. Berikut hasil wawancara dengan tokoh pemuda terkait

kriteria usia yang di tetapkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten

Wajo yang memprioritaskan kaum muda untuk bergabung sebagai berikut :

“Partai Solidaritas Indonesia ini unik dengan kriteria anggota dan calegnya mereka memberikan batasan dalam perekrutan menfokuskan anggota dan caleg dari kalangan muda, sebagai pemuda sendiri saya sangat sepakat dengan Partai Solidaritas Indonesia yang memberikan wadah untuk generasi muda.” (wawancara dengan AF)

Usia adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam kinerja seseorang semakin bertambah usia seseorang semakin menurun tingkat kinerjanya, karena tidak bisa dipungkiri usia ikut mempengaruhi tubuh manusia. Dari hasil wawancara dengan ke empat informan diatas masing-masing dari pihak partai, calon legislatif dan tokoh pemuda terkait kriteria usia yang ditetapkan oleh Partai Solidaritas Indonesian (PSI) Kabupaten Wajo dapat disimpulkan bahwa dalam merekrut anggota maupun calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo memberikan batas usia dari usia 21-45 tahun untuk orang-orang yang ingin bergabung atau terlibat dalam politik melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. dan pada awalnya partai ini memang memprioritaskan keanggotaan dari kalangan muda dan orang-orang baru dalam politik sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia(PSI) adalah partai anak muda.

b. Popularitas

Dalam dunia politik popularitas adalah salah satu pendukung dalam menghadapi pemilu, baik itu popularitas calon legislatif ataupun popularitas partai pengusung atau pendukung, semakin tinggi popularitas seseorang semakin tinggi kemungkinan sukses dalam pemilu, akan tetapi bagi partai baru

ataupun orang baru yang baru bergabung dalam politik akan menjadi masalah dikarenakan popularitas mereka masih sangat kurang di kalangan masyarakat bahkan bisa dikatakan masyarakat belum mengetahui keberadaan mereka. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah salah satu partai yang popularitasnya sangat minim di kalangan masyarakat, ditambah rata-rata calon legislatif dari partai ini adalah orang baru dalam politik yang belum ada jejak karir yang diketahui masyarakat dari mereka.

Akan tetapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam menghadapi masalah popularitas mereka di kalangan masyarakat mereka tidak terlalu mempermasalahakan hal tersebut karena mereka sadar akan posisi mereka sebagai partai politik baru yang muncul, begitupun calon legislatif mereka yang mereka usungkan pula tidak terlalu memiliki popularitas dikarenakan dalam proses rekrutmennya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak mengkhususkan bahwa hanya orang-orang yang memiliki popularitaslah yang mereka terima dalam rekrutmen calon legislatifnya, melainkan mereka membuka secara umum bagi orang-orang yang ingin menjadi calon legislatif tanpa mempermasalahakan terkait popularitas orang tersebut. Seperti yang di utarakan oleh salah satu pengurus DPD Partai Solidaritas Indonesiadi Kabupaten Wajo dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami menerima siapapun yang ingin bergabung dengan kami baik sebagai anggota bahkan menjadi calon legislatif kami meski mereka adalah orang yang tidak memiliki popularitas tinggi dikalangan masyarakat” (wawancara dengan FH).

Segala sesuatu harus dimulai dari bawah begitulah yang diyakini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam merekrut calon legislatifnya tidak peduli

orang yang namanya bahkan tidak pernah muncul di kalangan masyarakat, dan ini menjadi salah satu daya tarik orang-orang ingin bergabung dengan mereka dan bahkan menjadi calon legislatifnya dikarenakan mereka tidak memperhatikan popularitas seseorang, dan ini juga menjadi hal yang mempermudah bagi orang yang ingin bergabung, seperti yang dikatakan salah satu calon legislatifnya di kabupaten Wajo seperti berikut:

“Saya sendiri adalah orang baru dalam dunia politik dan saya bisa dikatakan orang yang tidak dikenal di masyarakat akan tetapi Partai Solidaritas Indonesia ini tidak menuntut untuk harus di kenal di masyarakat akan tetapi bagaimana dan apa yang akan di berikan kepada masyarakat” (wawancara dengan AJ).

Popularitas partai dan popularitas calon legislatif tidak menjadi masalah bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk terjun dan bertarung di ajang politik nasional Indonesia melainkan apa yang akan diberikan partai ataupun calon legislatif untuk masyarakat Indonesia secara umum, ketika itu adalah hal yang membawa perubahan yang baik bagi masyarakat itu sendiri. Popularitas bisa dibangun dengan menggunakan media kampanye partai ataupun dengan terjun langsung ke masyarakat memperkenalkan diri dan memperkenalkan visi-misi yang menjadi tujuan terlibat dalam dunia politik.

Dalam dunia politik siapapun yang memiliki niat untuk memberi perubahan yang baik bagi bangsa dan negara dan berani menentang hal-hal yang di luar aturan bernegara, popularitasnya akan meningkat dengan pesat dengan bantuan media yang ada. Bisa dikatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan popularitas orang yang direkrutnya dengan memprioritaskan kepada apa yang akan dibawa untuk

masyarakat yang lebih baik, perihal popularitas akan meningkat seiring berjalannya waktu.

c. Pendidikan

Di era sekarang pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan baik secara sosial maupun dalam kehidupan berpolitik, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula tanggung jawab yang di miliki dikarenakan mereka yang berpendidikan tinggi tidak diragukan lagi memiliki tingkat pengetahuan di atas rata-rata dalam menyikapi permasalahan yang ada baik itu masalah pribadi hingga masalah yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam proses rekrutmen politik, pendidikan adalah salah satu hal yang mendukung kapasitas seseorang dalam mengikuti rekrutmen politik dan menjadi salah satu syarat dalam proses rekrutmen politik bagi partai, akan tetapi sesuai aturan yang di tetapkan KPU terkait kriteria calon legislatif salah satunya menyinggung masalah pendidikan dimana pendidikan calon legislatif minimal SMA atau sederajat, terkait adanya aturan bahwa calon legislatif haruslah berpendidikan strata satu (S1) hanyalah peraturan dari pihak partai bersangkutan. Dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sendiri tidak memberikan peraturan khusus untuk calon legislatifnya, mereka hanya mengikuti peraturan yang di tetapkan KPU seperti dalam wawancara dengan salah satu pengurus partai Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Wajo yang seperti berikut :

“terkait masalah pendidikan bagi caleg kami hanya mengikuti apa yang dibahasakan KPU yang minimal tamatan SMA, adapun yang berpendidikan lebih tinggi dari itu justru lebih bagus lagi buat kami” (wawancara dengan MR)

Dalam rekrutmen politik latar belakang pendidikan seorang calon legislatif tidak menjamin kesiapan mereka terjun ke dunia politik tanpa adanya pembekalan khusus dari partai politik terkait pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik itu sendiri, dalam kriteria pendidikan yang ada di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidaklah begitu memperdulikan latar belakang pendidikan calon legislatifnya akan tetapi mereka diwajibkan mengikuti pendidikan politik dari Partai Solidaritas Indonesia guna menjadi bekal dalam kesiapan menghadapi pemilu yang akan datang, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dari pihak partai Partai Solidaritas Indonesia lainnya sebagai berikut :

“Pendidikan politiklah yang lebih penting ketika ingin terjun ke dunia politik karena dari sini dasar-dasar politik harus dipelajari caleg dan setiap partai politik pun wajib memberikan pendidikan politik bagi kader ataupun calegnya tidak terkecuali Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri” (wawancara dengan FH).

Latar belakang pendidikan calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo tidak khusus dari latar belakang pendidikan politik, banyak diantara mereka yang latar belakang pendidikannya tidak sejurus dengan politik, seperti misalnya ada dari latar belakang pendidikan keguruan, sains dll. Akan tetapi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo tidak permasalahan hal tersebut selama semua calon legislatifnya memiliki niat dan kemauan untuk memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya untuk bangsa dan negara, dan juga setiap calon legislatif siap mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. dari pihak calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia sendiri

justru memberikan tanggapan yang lucu terkait kriteria pendidikan yang biasanya diberikan oleh partai politik dalam merekrut kader atau calon legislatifnya, berikut hasil wawancara dari pihak calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Wajo:

“Masalah kriteria pendidikan dalam rekrutmen itu bagi saya tidak boleh di spesifikkan hanya orang yang berlatar belakang pendidikan politik yang bisa di terima, semua orang bebas mencalonkan dan semua orang bebas memilih selama itu baik untuk masyarakat, banyak di luar sana yang dari pendidikan politik justru menjadi tersangka KPK” (wawancara dengan MN).

Tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang terjangkau kasus korupsi Partai Solidaritas Indonesia saat ini adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan banyak pula yang memiliki latar belakang pendidikan dari sarjana-sarjana ilmu politik yang bisa dikatakan orang yang paham akan politik itu seperti apa dan untuk apa politik itu dan bagaimana besar tanggung jawab mendapat jabatan politik.

Dalam proses rekrutmen politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo terkait kriteria pendidikan dalam rekrutmen tidak begitu di spesifikkan bagi lulusan-lulusan ilmu politik akan tetapi selama ia memiliki ijazah SMA atau sederajat bisa diartikan calon tersebut telah lulus berkas dalam wilayah pendidikan, selebihnya pihak partai melakukan pendidikan politik khusus untuk calon-calon legislatif yang telah lulus berkas demi memberi bekal untuk kedepannya bagi calon legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.

d. Keuangan / finansial

Dalam rekrutmen politik calon legislatif yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten\Kota tidak mengatur tentang keadaan keuangan atau finansial seorang yang ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif. Hanya saja partai politik memiliki hak untuk menambah aturan bagi calon legislatifnya ketika memang itu di butuhkan.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam merekrut calon anggota legislatif kebanyakan hanya mengikut dengan apa yang di KPU dan UU termasuk kriteria calon legislatif dalam hal ini tentang keadaan keuangan bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri tidaklah dimasukkan sebagai aturan tambahan partai, melainkan partai sendiri yang akan membantu keperluan calon legislatif nantinya apabila lolos menjadi calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu calon anggota legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo sebagai berikut:

“Dalam proses rekrutmen kami tidak mempertanyakan masalah keuangan bakal calon karena kami memang ingin menerima orang-orang yang benar-benar ingin berjuang untuk rakyat baik itu dari masyarakat golongan menengah kebawah kami tetap akan menerimanya jika ia lolos berkas, uang itu urusan belakangan”
(wawancara dengan FH).

Menjadikan uang sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota legislatif tidaklah boleh di terapkan dalam sistem demokrasi karena itu akan mencederai esensi dari demokrasi itu sendiri. Hal di atas di senada dengan hasil wawancara dengan pihak partai lain sebagai berikut:

“Kami menerima semua dari kalangan masyarakat dalam proses rekrutmen, kami juga tidak membebani bakal calon dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang, kami tidak menerima sepeserpun dari bakal calon dalam proses rekrutmen kami” (wawancara dengan SN).

Keadaan keuangan memang adalah salah satu penunjang dalam berpolitik dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selalu membutuhkan dana yang terhitung tidak sedikit, akan tetapi dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan keuangan bakal calon adalah urusan belakangan yang lebih penting apa yang ingin di berikan untuk masyarakat kedepannya. Hal ini seperti yang wawancara dengan salah sat calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo seperti berikut:

“Kami tidak dimintai biaya apapun yang partai minta hanya bagaimana kesiapan dan hal apa yang ingin diberikan nanti ketika terpilih, justru dalam kampanye partailah yang dominan memberikan biaya kampanye kepada kami” (wawancara dengan MN).

Partai politik memiliki kewajiban membantu pendanaan kampanye calon legislatif dari partainya sendiri sebagai salah satu kepedulian untuk calon legislatifnya dan juga sebagai bantuan untuk meraih tujuan bersama. Terkait dalam proses rekrutmen bakal calon legislatif dana yang di pakai murni dari partai tanpa memungut biaya apapun dari bakal calon dan dengan demikian semua orang bebas mendaftarkan diri selama mereka memiliki niat untuk memberikan perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara dan masyarakat Kabupaten Wajo Khususnya. Bukan hanya orang yang berduit yang bisa bertarung dalam politik dan bukan cuma orang kaya yang bisa duduk dikursi wakil rakyat, semua orang bebas memilih dan dipilih dalam negara ini. Hal ini senada dengan tanggapan tokoh pemuda di Kabupaten Wajo ketika ditanyakn

terkait kriteria keuangan atau finansial yang menjadi penunjang bakal calon legislatif, hasil wawancara seperti berikut :

“Saya pribadi sepakat dengan statement bahwa semua orang bebas dipilih dan memilih, ini negara demokrasi bukan negaranya orang kaya, semua orang memiliki hak yang sama, saya sangat sepakat ketika kriteria dalam rekrutmen calon legislatif tidak membebani bakal calon dari segi finansial, mereka tidak boleh membatasi orang dengan keadaan keuangan seseorang” (wawancara dengan AF).

Dari hasil wawancara dengan pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dan juga calon legislatifnya hingga tanggapan tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Wajo terkait kriteria keuangan atau finansial dalam proses rekrutmen calon legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dapat disimpulkan bahwa dalam proses rekrutmen calon legislatif pihak partai tidak menjadikan finansial bakal calon sebagai kriteria untuk lolos menjadi calon legislatif dan pihak partai pun tidak mengambil sepeserpun uang dari bakal calon selama rekrutmen berlangsung dan justru ketika mereka lolos partailah yang akan membantu pendanaan kampanye calon legislatif hingga pemilihan berlangsung. Bagi DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo uang adalah urusan belakangan tetapi yang lebih penting adalah apa yang akan diberikan calon legislatif untuk masyarakat kedepannya ketika memang mereka lolos di pemilu mendatang.

e. Akseptabilitas

Akseptabilitas bagi calon legislatif sangatlah penting dimana dari sinilah dapat diketahui ia mampu diterima di kalangan masyarakat sebagai wakil rakyat dan juga mengetahui kecocokan orang tersebut dengan jabatan yang akan di amanahkan kepadanya, maka dari itu dalam proses rekrutmen politik

hal ini sangat diperhatikan oleh setiap partai politik dalam melakukan rekrutmen politiknya, tidak terkecuali dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), apalagi melihat kondisi popularitas partai yang bisa dikatakan tidak terlalu dikenal oleh masyarakat dikarenakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini tergolong partai yang baru muncul di pentas politik nasional.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam merekrut calon legislatif baik itu dari internal ataupun eksternal partai tetap sangat memperhatikan akseptabilitas bakal calon karena hal ini sangat berpengaruh bagi partai dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara karena jangan sampai orang yang tidak memiliki akseptabilitas di bidang politik menjadi wakil rakyat, seperti yang di sampaikan oleh pihak partai dalam wawancara sebagai berikut:

“Akseptabilitas bakal calon dalam rekrutmen itu sangat penting karena mereka nantinya akan menjadi wakil rakyat, terus bagaimana mungkin mereka akan di pilih ketika akseptabilitasnya kurang, keterterimaannya di masyarakat itu yang penting dan kecocokanya dengan jabatannya nanti” (wawancara dengan FH).

Akseptabilitas merupakan hal yang paling mendasar dalam proses rekrutmen calon legislatif, disini setiap calon legislatif dituntut harus dapat diterima di masyarakat karena tidak lain masyarakat juga yang akan memilih dan masyarakat juga yang akan di wakili nantinya.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo akseptabilitas bakal calon legislatif sangat diperhatikan apalagi rata-rata yang mendaftarkan diri kebanyakan dari kalangan anak muda yang belum memiliki popularitas di kalangan masyarakat. Hal ini juga menjadi

tugas berat bagi bakal calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia yang tergolong orang-orang baru. Seperti yang di sampaikan salah satu calon legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo seperti berikut:

“Akseptabilitas ini sebenarnya adalah tantangan besar bagi kami, mulai dari proses rekrutmen hal ini yang mungkin menjadi dasar pihak partai menentuksn lolos atau tidaknya kami waktu mendarat dulu, tapi salah satu cara menganalisa dengan menanyakan pengalaman organisasi, mungkin dari situ mereka menilainya” (wawancara dengan AJ).

Organisasi bisa dikatakan bentuk kecil dari sebuah negara dimana ada pemimpin dan yang dipimpin, bagi kebanyakan orang organisasi adalah tempat belajar bersosialisasi, belajar berbicara di depan umum serta belajar memahami fenomena-fenomena yang ada dan cara mengatasinya. Pengalaman organisasi merupakan salah satu penunjang seseorang ketika ingin terjun ke dunia politik dan masyarakat. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan pihak partai lainnya sebagai berikut :

“Organisasi itu penting, banyak hal yang akan didapatkan dalam organisasi, seperti akseptabilitas ini, besar kemungkinan masyarakat dapat menerima orang yang pernah bergelut dengan organisasi, apalagi masyarakat sekarang sudah cerdas dalam memilih, organisatoris pasti paham fenomena-fenomena yang ada di masyarakat dan cara menyikapinya” (wawancara dengan MR).

Dari hasil wawancara ke tiga informan di atas terkait akseptabilitas bakal calon legislatif dalam proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dapat disimpulkan bahwa hal ini adalah yang paling diperhatikan pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam merekrut calon legislatifnya dikarenakan penerimaan masyarakatlah yang sangat penting ketika ingin terjun ke dunia politik sebab dalam pemilu mendarat yang memilih adalah masyarakat dan yang akan diwakili adalah masyarakat pula, dan

salah satu cara menganalisa akseptabilitas bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri adalah mengetahui pengalamannya baik itu latar belakang pendidikan sampai dengan pengalaman organisasi yang dimiliki bakal calon, maka wajar pada saat ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lebih mengfokuskan keanggotaan serta calon legislatifnya dari kalangan anak muda yang paham dengan fenomena-fenomena yang dihadapi masyarakat pada saat ini.

f. Kapabilitas

Seorang wakil rakyat haruslah memiliki kemampuan atau skill yang lebih baik dari rata-rata masyarakat yang ada dikarenakan merekalah yang akan mewakili rakyat di Parlemen, baik itu kemampuan memahami diri sendiri hingga kemampuan menerima dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Maka dari itu sebelum merekrut calon legislatif setiap partai memperhatikan kapabilitas setiap bakal calon dan melakukan penyaringan sebaik-baik mungkin.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses rekrutmen calon legislatifnya juga sangat memperhatikan kapabilitas dari setiap bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri, terlebih bagi bakal calon dari eksternal partai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak partai seperti berikut :

“dalam rekrutmen, kapabilitas tidak boleh dilewatkan, apalagi bakal calon yang dari eksternal partai, kalau yang dari internal partai jelas kami sudah mengetahuinya”
(wawancara dengan SN).

Dalam proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo terkait dengan kapabilitas bakal calon yang mendaftar

pihak partai memberikan contoh permasalahan yang ada di masyarakat dengan melihat bagaimana bakal calon menyikapinya, hal ini seperti hasil wawancara dengan pihak penguji dari pihak partai seperti berikut :

“Ketika berbicara terkait kapabilitas seseorang itu sebenarnya agak sulit untuk mengetahui, mungkin pribadinya sendiri yang mengetahui kemampuannya, akan tetapi kami hanya mencoba menggantinya dengan memberikan contoh permasalahan dan melihat bagaimana bakal calon ini menyikapinya” (wawancara dengan FH).

Menggali potensi seseorang dengan menghadapkannya dengan permasalahan sosial adalah salah satu cara yang efektif untuk mengetahui seberapa mampu seseorang menyelesaikan sebuah permasalahan, apalagi ketika nantinya seseorang tersebut menjadi wakil rakyat di pemerintahan yang memang dituntut mampu menyelesaikan apa yang menjadi keluhan rakyat.

Pola rekrutmen seperti di atas di benarkan oleh salah satu calon legislatif dalam wawancara seperti berikut :

“kami memang waktu di seleksi diberikan pertanyaan terkait bagaimana menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang di hadapi masyarakat Kabupaten Wajo pada saat ini” (wawancara dengan MN).

Anggota legislatif mempunyai tugas untuk menerima aspirasi rakyat dan semaksimal mungkin mencoba memberikan solusi terkait permasalahan yang diadukan masyarakat. Kapabilitas anggota legislatif tidak diragukan dalam hal menyikapi masalah-masalah yang ada, hanya saja masih ada oknum yang selalu menyalahgunakan wewenang yang telah diamanahkan kepada mereka demi kepentingan sendiri.

Dari hasil wawancara dengan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap partai politik dalam merekrut calon legislatifnya sangat memperhatikan kapabilitas bakal calon sebagai bekal dalam menghadapi dan menyikapi Masalah-masalah yang ada di masyarakat. Begitupun dengan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam rekrutmen calon legislatifnya tidak melewatkan perhatian terhadap kapabilitas bakal calon yang mendaftar baik itu dari internal partai apalagi dari eksternal partai dan salah satu metode yang digunakan dalam menguji kapabilitas bakal calon dengan memberikan pertanyaan terkait bagaimana bakal calon menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya terkhusus di Kabupaten Wajo sendiri. Dari sinilah pihak partai menganalisa kapabilitas bakal calon yang nantinya akan menjadi perwakilan dalam pemilu mendatang.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo terkait kriteria yang ditetapkan tidaklah begitu menyulitkan bakal calon baik dari segi usia yang ditetapkan kisaran 21-45 tahun akan tetapi mengfokuskan bagi kalangan muda meski tidak memiliki popularitas tinggi dikalangan masyarakat dan latar belakang pendidikan di bidang politik akan tetapi pihak partailah yang akan memberikan pendidikan khusus kepada calon legislatifnya tanpa meminta bayaran sepeser kepada bakal calon karena memang Partai Solidaritas Indonesia tidak menjadikan finansial seseorang sebagai kriteria wajib untuk ikut berpartisipasi di Partai Solidaritas Indonesia akan tetapi akseptabilitas dan kapabilitas bakal calonlah yang penting apakah bisa menjalankan amanah untuk berjuang bersama Partai

Solidaritas Indonesia dan masyarakat untuk melawan tindakan korupsi dan sikap intoleran.

3. Kontrol

Setiap kegiatan diharapkan berjalan dengan baik dan maksimal demi tercapainya sebuah tujuan atau hasil yang diinginkan bersama, maka dari itu kontrol sangat penting dalam setiap kegiatan, termasuk kontrol dari pihak penyelenggara, seperti halnya dalam proses rekrutmen calon legislatif alangkah baiknya pihak partai mengontrol setiap agenda yang berlangsung. Akan tetapi kontrol yang dimaksud disini adalah kontrol pihak partai politik kepada bakal calon legislatifnya dalam proses rekrutmen politik yang di selenggarakan.

DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses rekrutmen politiknya melakukan kontrol kepada bakal calon legislatifnya baik itu dari internal partai ataupun dari eksternal partai.

a. Internal Partai

Kebanyakan partai politik mengusung calon legislatif dari internal partainya sendiri dikarenakan orang yang dari internal partai pastilah paham akan visi-misi partai yang ditempatinya dan juga dalam proses perekrutmennya tidak begitu sulit untuk dikontrol karena mereka telah paham dan bisa dikatakan juga mereka adalah pelaksana proses rekrutmen meskipun mereka juga menjadi peserta rekrutmen.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo, pihak partai melakukan kontrol bukan hanya kepada

bakal calon legislatif akan tetapi semua pihak yang terlibat tidak luput dari perhatian, terkait kontrol bagi bakal calon dari internal partai, pihak partai hanya melakukan pengecekan berkas yang harus di penuhi dan yang menjadi syarat yang telah di tetapkan di KPU dan pada pelaksanaan rekrutmen pihak partai hanya mengontrol dengan mendampingi atau mengawasi setiap kegiatan dan membimbing bakal calon ketika ada yang tidak di ketahui oleh bakal calon, hal ini di sampaikan pihak partai dalam wawancara seperti berikut :

“Mengontrol jalannya proses rekrutmen adalah tugas kami dari Partai Solidaritas Indonesia sendiri, kami dari pihak partai selalu mendampingi bakal calon baik itu dari internal maupun dari eksternal partai dan ketika ada yang mereka tidak paham kami bantu sebisa mungkin agar semuanya berjalan lancar”(wawancara dengan MR).

Bakal calon legislatif dari internal partai dalam mengikuti proses rekrutmen menjadi calon legislatif tetap diperlakukan sama dengan bakal calon dari eksternal partai yang harus mengikuti ketentuan atau aturan yang di tetapkan partai agar segalanya berjalan dengan lancar. Dan bagi DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo kontrol yang dilakukan bukan hanya sampai pada selesainya rekrutmen dari partai melainkan akan terus dikontrol sampai di KPU dan sampai pemilu selesai. Berikut hasil wawancara dari pihak partai dan juga sebagai calon legislatif dari internal :

“Kontrol yang dilakukan pihak partai bukan hanya sekedar dalam proses rekrutmen akan tetapi sampai nantinya pemilu selesai, saya sendiri caleg dari internal partai tetap dikontrol baik itu persiapan dan kegiatan-kegiatan apa yang nantinya akan dilaksanakan untuk kampanye, kalau hanya dalam proses rekrutmen mengontrolnya sangat mudah hanya mengawasi apa ada yang tidak dipaham bakal calon atau tidak” (wawancara dengan AJ).

Mengawasi dan mengontrol bakal calon sampai dengan lolos menjadi calon legislatif atau perwakilan partai di pemilu mendatang adalah hal yang

tidak boleh di hentikan sampai dengan proses rekrutmen saja akan tetapi sampai pemilu selesai dilaksanakan pihak partai wajib mengontrol segala bentuk kegiatan dan individu calon legislatif itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa bakal calon legislatif dari internal partai harus mengikuti aturan yang ada dan tidak di bedakan dengan calon legislatif dari eksternal partai dan setiap kegiatan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan bertarung di pemilu pihak partai masih tetap melakukan kontrol terhadap calon legislatifnya. Dan yang harus dipahami disini bahwa ada dua jenis calon legislatif, yang pertama dari internal partai yang sejak pertama adalah kader atau pengurus partai yang mencalonkan diri dan dari eksternal partai yang bergabung pada saat momen pemilu semakin dekat dengan kata lain orang yang menggunakan partai politik sebagai kendaraan menuju Parlemen, akan tetapi ketika lolos dalam rekrutmen tetap akan tercatat sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan kader-kader lain.

b. Eksternal Partai

Seperti yang dibahasakan diatas bahwa calon legislatif dari eksternal memiliki sedikit perbedaan dengan calon dari internal partai. Akan tetapi dalam proses rekrutmen semua disama ratakan dan bersaing untuk lolos menjadi calon legislatif partai.

Terkait kontrol yang dilakukan pihak partai tidaklah jauh berbeda dengan yang lainnya hanya saja calon legislatif dari eksternal partai mendapat tambahan dengan harus mengetahui visi-misi dan apa yang melatar belakangi Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) ini terbentuk dalam artian ada pengenalan khusus yang diberikan bakal calon agar mengetahui partai itu sendiri. Seperti yang di bahasakan dalam wawancara dengan pihak partai DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo seperti berikut:

“sistem kontrol kami sama dalam proses rekrutmen hanya saja ada tambahan pengenalan bagi bakal calon dari eksternal partai, mereka harus paham kemana dan apa tujuan kapal yang mereka tumpangi dalam artian mereka harus tahu apa dan bagaimana Partai Solidaritas Indonesia ini” (wawancara dengan SN).

Tingkat kontrol yang dilakukan pihak partai sama pada saat proses rekrutmen berlangsung hanya saja akan lebih banyak didampingi bakal calon dari eksternal partai karena kurangnya pemahaman terkait proses rekrutmen, seperti yang disampaikan pihak partai yang lain seperti berikut;

“Dari eksternal partai biasanya lebih banyak pendampingan atau mengontrol mereka sedikit lebih berbeda dengan yang lain, akan tetapi ketika mereka lolos merekalah yang lebih sering dikontrol karena ada beberapa asupan terkait partai yang harus mereka ketahui, seperti halnya siswa baru disekolah harus di berikan pemahaman aturan-aturan dll”(wawancara dengan FH).

Dalam proses rekrutmen pihak partai tetap mengawasi atau mengontrol jalannya rekrutmen seperti biasanya hanya saja bagi bakal calon legislatif dari eksternal partai lebih memiliki pendampingan atau kontrol yang banyak dari pihak internal dikarenakan masih kurangnya pemahaman serta memang masih sangat membutuhkannya dampingan dari pihak partai terkait pola rekrutmen yang di tetapkan oleh partai Partai Solidaritas Indonesia, baik itu dari persiapan dan kelengkapan berkas hingga tambahan terkait pengenalan Partai Solidaritas

Indonesia (PSI) itu sendiri terkhusus DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.

Dari penjelasan di atas terkait kontrol yang dilakukan pihak partai baik bagi bakal calon dari internal partai maupun eksternal partai dapat disimpulkan bahwa DPD Partai Solidaritas Indonesia tetap mengontrol seperti hasilnya partai-partai lain mengontrol bakal calon dan calon legislatifnya hanya saja bagi bakal calon dari eksternal partai akan diberikan pemahaman khusus terkait pengenalan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara umum sampai bakal calon tersebut mengetahuinya, dan juga kontrol yang dilakukan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo tidak hanya sampai pada proses rekrutmen calon legislatifnya melainkan kontrol terus berlangsung sampai dengan pemilihan umum selesai di laksanakan, baik kontrol pendanaan kampanye sampai dengan kontrol strategi menghadapi pemilihan umum dan hal ini berlaku untuk semua bakal calon tanpa membedakan laki-laki dan perempuan begitupun pada tahap-tahap sebelumnya, karena Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang juga menjunjung tinggi kesetaraan.

Adapun nama-nama calon legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo yang lolos mengikuti pemilu berjumlah 12 orang yang bertarung di 5 Daerah Pemilihan (Dapil) dari 6 Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kabupaten Wajo.

Tabel 4.3 Daftar Nama Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia(PSI) Kabupaten Wajo

No	Nama Calon Legislatif	L/P	Umur	Dapil
1	Muhlis	L	28	2
2	Novitasari	P	27	2
3	Rahmadani	P	29	2
4	Aris	L	32	3
5	Nuryadi Pawennari	L	30	3
6	Najwa sopyah	P	28	3
7	H.Andi Jumacri, SH	L	28	4
8	Muh.Asdar Asmar, SE	L	30	4
9	Mustina, S.si	P	27	4
10	Firmawan Hergan, SE	L	29	5
11	Sudarmono	L	35	5
12	Besse Tenri Abeng	P	32	5

Sember : DPD Partai Solidaritas Indonesia(PSI) Kab.Wajo

Dari data yang diperoleh dari pihak partai bahwa semua calon legislatif yang di rekomendasikan melihat dari usia setiap calon dapat disimpulkan bahwa benar pihak Partai Solidaritas Indonesia lebih memprioritaskan kalangan muda untuk ikut berpartisipasi dalam partai Partai Solidaritas Indonesia.

Tabel 4.4 Jumlah Perolehan Suara PARTAI SOLIDARITAS INDONESIASetiap Dapil

NO	DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)	JUMLAH SUARA
1	DAPIL 1	21
2	DAPIL 2	36
3	DAPIL 3	87
4	DAPIL 4	154
5	DAPIL 5	86
6	DAPIL 6	34
TOTAL	6 DAPIL	418

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo

Akan tetapi ditinjau dari hasil pemilu pada 17 april 2019 rekapan suara yang ada di Kabupaten Wajo untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ataupun calon legislatifnya tidak mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo terkait hasil pemilu yang tidak mencapai target dengan menghubungkan pola rekrutmen calon legislatifnya, adapun tanggapan dari pihak partai seperti berikut :

“Sangat disayangkan kami tidak mendapat kursi akan tetapi kami telah melakukan rekrutmen sesuai arahan dari pimpinan atas dan ini tidak menurunkan semangat kami, meskipun kami tidak menjadi wakil rakyat akan tetapi kami dari Partai Solidaritas Indonesia akan tetap mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan” (wawancara dengan FH).

Memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara tidak harus menjadi anggota legislatif akan tetapi dengan menjadi warga negara yang baik dan selalu mengawal setiap kebijakan pemerintah juga merupakan kontribusi untuk negara. Terkait dengan pola rekrutmen calon legislatif dan hasil pemilu merupakan suatu pembelajaran yang sangat berarti bagi Partai Solifaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru yang muncul, hal ini pun di bahasakan oleh pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam wawancara seperti berikut :

“ini bukan sebuah kegagalan rekrutmen akan tetapi ini memang yang menjadi tantangan terbesar Partai Solidaritas Indonesia dan sebagai pembelajaran untuk kedepannya, rekrutmen kami sudah benar hanya saja kami memang masih baru di kalangan masyarakat, kami belum memiliki popularitas di masyarakat” (wawancara dengan MR).

Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia memang mengfokuskan kepada kalangan anak muda yang notabenennya adalah orang-orang baru yang dimunculkan yang berdampak pada popularitas calon legeslatif yang sangat minim dikalangan masyarakat, akan tetapi Partai Solidaritas Indonesia sendiri akan terus berjuang demi tujuan yang mereka inginkan meski harus gagal pada

pemilu hari ini akan tetapi Partai Solidaritas Indonesia tidak akan berhenti memerangi korupsi Partai Solidaritas Indonesia dan sikap intoleran yang semakin marak di masyarakat, hal ini di sampaikan pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Wajo dalam wawancara lanjutan seperti berikut:

“Melawan korupsi adalah sebuah kewajiban setiap anggota Partai Solidaritas Indonesia karena pada dasarnya korupsi adalah musuh nyata bagi negara kita, setiap anggota Partai Solidaritas Indonesia baik itu pengurus ataupun caleg pasti paham apa yang diperjuangkan karena pada mulanya ketika ingin bergabung ataupun menjadi caleg di Partai Solidaritas Indonesia harus memberikan tulisan atau literatur terkait cara melawan korupsi dan sikap intoleran” (wawancara dengan MN).

Adapun tanggapan pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo sekaligus calon legislatif dengan hasil pemilu yang dikaitkan dengan pola rekrutmen calon legislatif tidak jauh berbeda dengan pendapat pengurus lain, yaitu seperti berikut :

“Kami tidak menyalahkan pola rekrutmen kami, akan tetapi memang ini adalah sebuah tantangan bagi kami, kami yakin pimpinan partai telah merumuskan pola rekrutmen yang baik dan sesuai dengan konteks zaman, mulai dari terbuka secara online hingga verifikasi berkasnya. ketika kami tidak lolos di pemilu setidaknya ini menjadi langkah awal pengenalan kami di masyarakat bahwa Partai Solidaritas Indonesia itu ada” (wawancara dengan FH).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai baru wajar ketika mereka belum memiliki popularitas dikalangan masyarakat ditambah dengan para anggota dan calon legislatifnya rata-rata dari kalangan anak muda yang kebanyakan hanya bergelut dengan teori pada masa-masa mahasiswa. Akan tetapi ini merupakan modal besar bagi Partai Solidaritas Indonesia dengan semangat dan tekad jiwa muda yang masih membara untuk memberikan perubahan yang lebih baik kedepannya.

Bagi masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemilu ternyata juga masih sangat dipengaruhi oleh aspek penokohan dan latar belakang keyakinan calon legislatif ataupun partai politik dan hal ini yang juga sangat merugikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang notabeneanya di ketuai dan didirikan oleh tokoh perempuan Grace Natalie yang beragama Kristen, khususnya di Kabupaten Wajo pemahaman masyarakat seperti ini yang masih sangat kental menjadi tantangan besar bagi Partai Solidaritas Indonesia untuk mendapatkan nilai lebih dikalangan masyarakat.

Perbedaan keyakinan seperti diatas masih sangat mempengaruhi pilihan masyarakat di kabupaten wajo seperti hasil wawancara dengan tokoh masyarakat seperti berikut :

“Sayakan muslim jadi saya secara pribadi tidak akan memilih partai atau caleg yang berbeda keyakinan dengan saya, seperti Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia karena partai itu partainya orang kristen” (wawancara dengan AA).

Hal inipun tidak jauh berbeda dengan pendapat tokoh agama di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo terkait hal-hal yang mempengaruhinya dalam menentukan pilihan pada pesta demokrasi di Indonesia dalam wawancara seperti berikut :

“Indonesia memang bukan negara muslim akan tetapi jikalau bisa pilihlah calon pemimpin yang seagama denganmu, kalo yang beragama islam silahkan pilih partai islam atau caleg islam, kalo non muslim yaa silahkan menentukan pilihan” (Wawancara dengan MA)

Pengaruh perbedaan keyakinan yang masih sangat kental dikalangan masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemilu adalah salah satu tantangan besar bagi partai politik, lebih-lebih dengan Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Wajo yang mayoritas penduduknya beragama islam.

Akan tetapi hal ini juga yang membuat Partai Solidaritas Indonesia di Kabupaten Wajo sangat kurang mendapat apresiasi di mata masyarakat hal ini di benarkan dengan wawancara dengan pihak calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo seperti berikut:

“Memang masyarakat masih sangat kental dengan hal demikian dan hal itupun yang terkadang membuat kami dari caleg Partai Solidaritas Indonesia susah mengkampanyekan diri kepada masyarakat, karena sedikit-sedikit keluar bahasa seperti Partai Solidaritas Indonesia partai kristen dan dipimpin oleh perempuan, hal seperti ini sering saya dapat di masyarakat” (Wawancara dengan MN).

Masalah perbedaan keyakinan dan jenis kelamin dalam memilih pemimpin yang masih banyak ditemukan di kabupaten wajo, pihak Partai Solidaritas Indonesia menanggapi hal-hal demikian sebagai tantangan nyata bagi Partai Solidaritas Indonesia, hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo seperti berikut:

“Masalah-masalah seperti inilah yang menjadi tantangan besar bagi kami, dan hal-hal seperti inilah yang diperjuangkan Partai Solidaritas Indonesia yaitu merawat dan memperkuat kebhinekaan bukannya menjadikan perbedaan sebagai pemisah bagi kita semua apalagi membuat kita saling bertengkar. Itulah salah satu tujuan Partai Solidaritas Indonesia yang terus kami perjuangkan” (Wawancara dengan FH).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukan hanya popularitas calon saja yang membuat Partai Solidaritas Indonesia tidak lolos dalam pemilu 2019 akan tetapi masih kentalnya pemahaman masyarakat akan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan kesetaraan yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan dan memilih calon pemimpin atau calon legislatif di daerahnya, dan hal ini bagi DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi dan karena

hal ini pula yang salah satunya melatar belakangi Partai Solidaritas Indonesia ingin memperkuat kebhinekaan bukannya menjadikan perbedaan untuk memecah persatuan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo hanya mengikuti arahan dari pengurus pusat Partai Solidaritas Indonesia yang telah di edarkan ke setiap DPW hingga DPD Partai Solidaritas Indonesia. Terkait hasil pemilu ketika ingin di hubungkan dengan pola rekrutmen calon legislatifnya bukanlah menjadi alasan untuk mengatakan Partai Solidaritas Indonesia gagal pada pemilu 2019 melainkan memang rata-rata calon legislatif dari DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo sangat minim dalam hal popularitas dikalangan masyarakat di tambah dengan pemahaman kebanyakan masyarakat masih sangat kental dengan hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan kesetaraan dalam menentukan pilihan dan pihak partai meyakini bahwa inilah tantangan terbesar Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai baru yang berpartisipasi dalam pemilu dan ini menjadi pembuktian dan pengenalan kepada masyarakat indonesia khususnya di Kabupaten Wajo bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah hadir sebagai wadah baru untuk kalangan anak muda yang siap berjuang untuk melawan korupsi dan memperkuat kebhinekaan yang ada di masyarakat tanpa harus saling menyalahkan keyakinan setiap orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah didapat dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya terkait pola rekrutmen dan prosedur rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait dapat disimpulkan seperti berikut :

1. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proses rekrutmen calon legislatif menggunakan pola rekrutmen terbuka dengan memberikan kebebasan bagi masyarakat yang ingin ikut terlibat atau mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dan bukan menggunakan pola tertutup yang hanya akan menguntungkan segelintir elit saja.
2. Dalam proses rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo melalui 3 tahap seperti penyediaan, kriteria dan kontrol.
3. Tahap penyediaan mengatur mulai dari mekanisme, waktu dan tempat hingga sarana perekrutan yang telah ditentukan pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.
4. Tahapan penentuan kriteria seperti usia, pendidikan, akseptabilitas dan kapabilitas bakal calon sangat diperhatikan berbeda dengan kriteria popularitas dan finansial bakal calon yang tidak terlalu di pertimbangkan

karena DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo menerima siapapun yang ingin bergabung meski belum memiliki popularitas tinggi dikalangan masyarakat dan juga tidak membatasi bakal calon dengan latar belakang keuangannya yang dimiliki.

5. Dalam tahapan kontrol proses rekrutmen pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo melakukan kontrol bukan hanya dalam proses rekrutmen akan tetapi hingga proses kampanye calon legislatifnya.
6. Kegagalan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam pemilu 2019 dikarenakan masyarakat Kabupaten Wajo masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan gender dalam memilih calon pemimpin dan calon legislatif.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada Pola rekrutmen prosedur rekrutmen calon legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dari penulis yaitu:

1. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo tetap menggunakan pola rekrutmen terbuka dengan catatan lebih mempertimbangkan kriteria-kriteria yang di berikan kepada bakal calon untuk menutupi hal-hal yang tidak dimiliki partai.
2. DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo dalam proseder atau tahapan penentuan kriteria alangkah baiknya lebih

mempertimbangkan popularitas bakal calon untuk mengimbangi popularitas partai yang masih sangat minim dikalangan masyarakat.

3. Untuk menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan gender yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan, pihak DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo harusnya lebih gencar melakukan sosialisasi terkait hal-hal tersebut agar dalam PSI dapat diterima masyarakat dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Anto, Muhammad. 2016. Skripsi '*Partai Keadilan Sejahtera Di Kabupaten Takalar*'. Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ariwibowo, Hendri, 2013. '*Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang*'. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Cangara, Hafied. 2009. '*Komunikasi Politik*'. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dryartana, Edwin Yustian, 2010. Skripsi '*Kedudukan Partai Politik Lokal Di Nangroe Aceh Darussalam Ditinjau Dari Asas Demokrasi*'. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Firmanzah. 2011. '*Mengelola Partai Politik*'. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hamid, Ahmad Farhan. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh*. Jakarta : Kemitraan
<https://psi.id>
- Ihyauddin, 2012. Skripsi '*Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Priode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera & Partai Demokrat)*'. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiversitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Ilham, Teguh. 2015. '*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis*'. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Kantaprawira, Rusadi 2004. '*Sistem Politik Indonesia*'. Bandung : Sinar Baru Algesido.

- Labolo, Muhadam. 2015. *'Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Teori, Konsep dan Isu Strategis'*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Martini, Rina, 2013. *'Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang'*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Miriam Buadjarjo 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwitasari, Arinta Yulyasa. 2014. *'Pola Rekrutmen Calon Legislatif Provinsi Jawa Tengah Partai Nasional Demokrat Pada Pemilu 2014 (Studi Di Dpw Partai Nasional Demokrat Jawa Tengah)'*. Prosiding Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Rahmadania, Fitri. 2014. *'Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik PPP di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur)'*.
- Saputra, Wengki. 2012. Skripsi *'Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam)'*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
- Sugiyono. 2013. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"*. Bandung: Alfabeta.
- Suyoto, 2016. Skripsi *'Perbandingan Pola Rekrutmen Politik Antara Partai Politik Islam Dan Nasionalis Pada Pemilu 2014. (Studi Kasus Antara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)'*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Waskita, Okky Singngi Laksono Aji,2016. ''Optimilisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)'' . Diponegoro Law Journal, Vol.5, Nomor 4, Tahun 2016.



RIWAYAT HIDUP



ILHAMSyah. Dilahirkan di Kabupaten Wajo tepatnya di Lurae Pada Tanggal 15 November 1995. Anak ke 4 dari 6 bersaudra. Anak dari pasangan Marzuki dan Rusnawati. Penulis awal mengenal pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 47 Mamminasae Tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP 1 Gilireng dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan di SMA 1 Majauleng pada tahun yang sama yaitu 2011 dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2014 pula penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dan penulis menyelesaikan Kuliah Strata Satu (S1) pada tahun 2019.

